

**Penanganan permukiman kumuh berdasarkan pola pembangunan
perumahan bertumpu pada kelompok (p2bpk) di ert 03 rw 1 dan rt03 rw vii
kelurahan mojosongo kecamatan jebres
Kota surakarta**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Geografi
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :
Amelia Febrina Putri
NIM. K5497005

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2003**

ABSTRAK

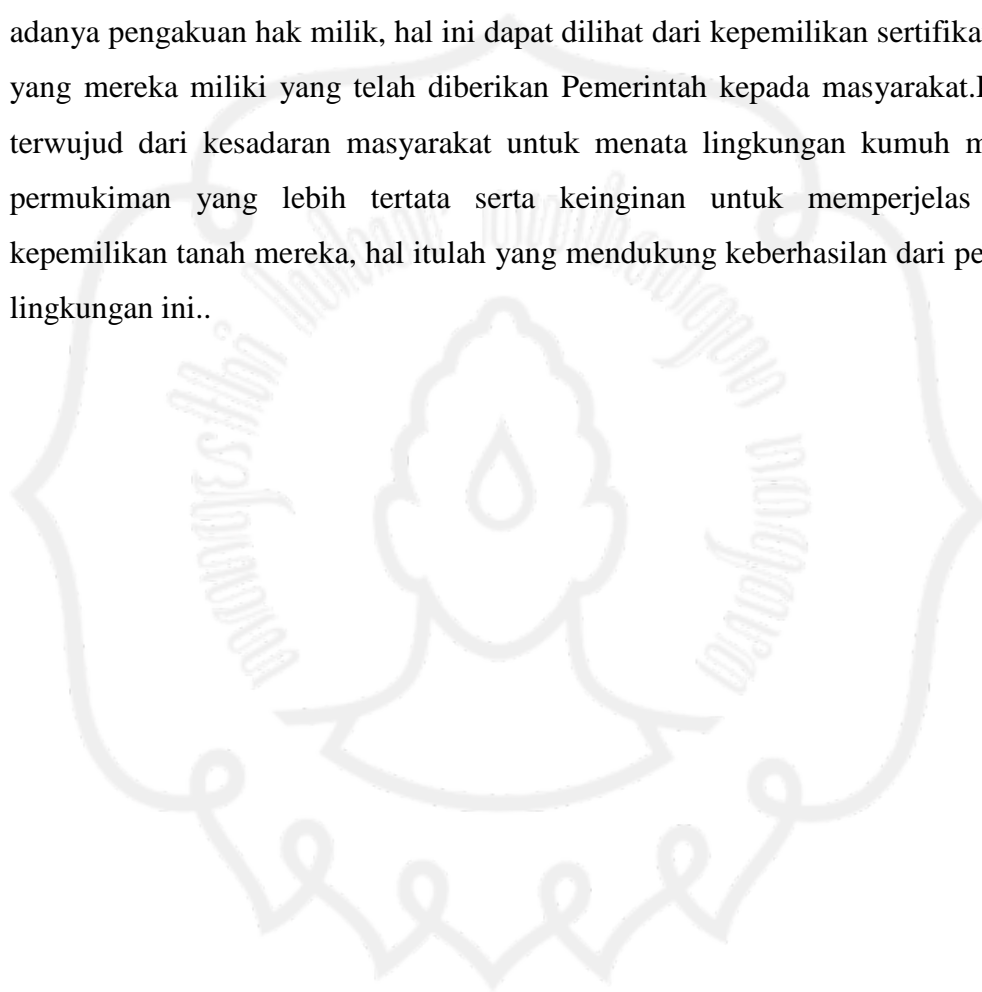
Amelia Febrina Putri. Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pola Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) di RT 03 RW 1 dan RT 03 RW VII Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. April. 2003.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan permukiman kumuh dan untuk mengetahui kondisi permukiman setelah adanya program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) dilihat dari manfaat yang diperoleh dan pengaruhnya terhadap perilaku penduduk setempat.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mojosongo dengan mengambil sample di RT 03 RW 1 dan RT 03 RW VII. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui interview secara langsung dengan penduduk setempat, dibantu oleh ketua RT, ketua RW setempat dan kepala Kelurahan Mojosongo, selain itu metode yang digunakan yaitu dengan observasi tentang kondisi lingkungan permukiman dan kondisi bangunan perumahan. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan tabel, dari berbagai data kemudian diolah, ditafsirkan dan diinterpretasikan untuk menjawab perumusan masalah kemudian diambil kesimpulan. Pada penelitian ini tidak menggunakan validitas data karena data-data yang didapat sudah dianggap valid, kevalidan data bersumber dari sumber yang bersangkutan.

Hasil penelitian sebagai berikut : Penanganan permukiman kumuh di RT 03 RW 1 dan RT 03 RW VII Kelurahan Mojosongo menggunakan pola Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) ini telah mampu mengubah lingkungan fisik dimana masyarakat dapat menikmati hasil dari penataan lingkungan mereka. Rumah yang mereka tempati sekarang ini telah memenuhi syarat sebagai hunian, baik syarat teknis maupun syarat kesehatan. Dimana hal itu dapat dilihat dari adanya kepemilikan saluran air/selokan, jaringan listrik, kepemilikan sumber air bersih, ventilasi, MCK yang menunjukkan bahwa semua warga telah mempunyai fasilitas tersebut. Untuk fasilitas lain seperti sarana

kesehatan baik di Mojosongo Berseri I RT 03 RW 1 maupun Mojosongo Berseri II RT 03 RW VII telah memiliki Puskesmas dan Posyandu. Kondisi perumahan di Permukiman ini juga sudah memenuhi persyaratan layak huni hal ini dapat dilihat dari kondisi dinding rumah mereka yang terbuat dari tembok, dan kondisi lantai rumah yang tidak lagi berupa tanah. Dengan adanya penataan lingkungan perumahan ini masyarakat telah mempunyai rumah yang permanen dengan adanya pengakuan hak milik, hal ini dapat dilihat dari kepemilikan sertifikat tanah yang mereka miliki yang telah diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini terwujud dari kesadaran masyarakat untuk menata lingkungan kumuh menjadi permukiman yang lebih tertata serta keinginan untuk memperjelas status kepemilikan tanah mereka, hal itulah yang mendukung keberhasilan dari penataan lingkungan ini..



MOTTO

Sesungguhnya didalam kesulitan itu pasti ada kemudahan

(Q.S Alam Nasyrat :6)

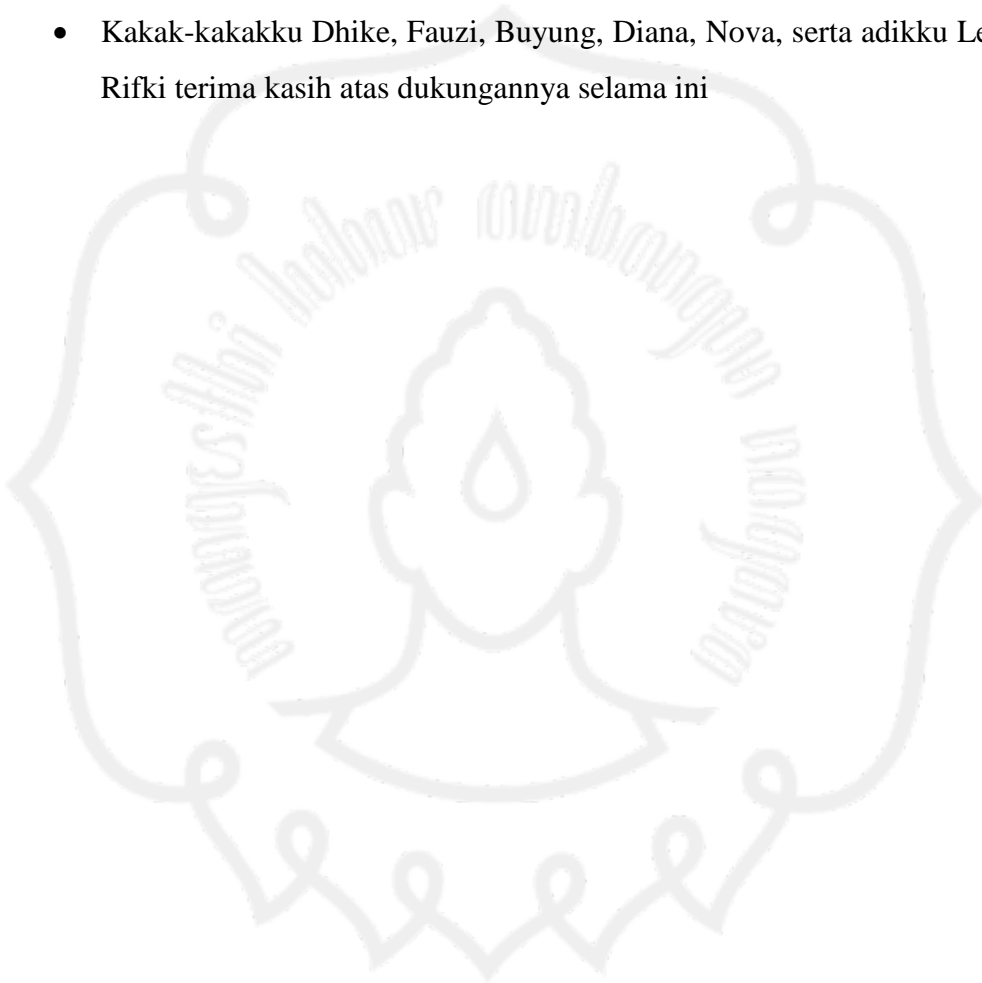
Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pada akal, dan akal yang diperindah dengan ilmu, dan ilmu yang diperindah dengan kebenaran-kebenaran, dan kebenaran-kebenaran yang diperindah dengan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang diperindah dengan taqwa.

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dorongan serta kasih sayang dengan tulus dan ikhlas
- Suamiku tercinta Budi Setyono yang senantiasa mendampingiku disaat suka maupun duka
- Anakku tersayang Zaidan yang menghiasi hari-hariku dengan tawa dan canda
- Kakak-kakaku Dhike, Fauzi, Buyung, Diana, Nova, serta adikku Leli dan Rifki terima kasih atas dukungannya selama ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul : **PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN POLA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERTUMPU PADA KELOMPOK (P2BPK) DI KELURAHAN MOJOSONGO KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA.**

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui ijin atas permohonan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak M. Gamal Rindarjono, M.Si selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada peneliti hingga sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan teknis dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku di Kost Ma`arif mania camp yang senantiasa memberikan bantuan moral.
6. Rekan-rekan Program Pendidikan Geografi angkatan 97 atas persahabatannya selama ini
7. Berbagai pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu

Dalam penelitian ini, peneliti telah berusaha mencurahkan segala kemampuan samaksimal mungkin dengan harapan skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah yang bermanfaat. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Amin.

Penulis

Amelia Febrina Putri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Tinjauan pustaka	7
1. Permukiman kumuh	7
a. Pengertian permukiman kumuh	7
b. Karakteristik permukiman kumuh	9
c. Kriteria permukiman kumuh.....	11
d. Proses terjadinya permukiman kumuh.....	16
e. Faktor-faktor terjadinya permukiman kumuh	21
f. Bentuk-bentuk penanganan permukiman-permukiman Kumuh.....	23
2. Program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK)	26
a. Pengertian.....	26
b. Tujuan.....	27
c. Asas dan prinsip dasar.....	28

d. Program dasar.....	29
B. Penelitian yang relevan	31
C. Kerangka berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis penelitian.....	33
B. Tempat dan waktu penelitian	33
C. Populasi dan sample.....	33
D. Teknik pengambilan sample	34
E. Variabel.....	34
F. Teknik pengumpulan data.....	36
G. Validitas data.....	36
H. Teknik analisis data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Deskripsi umum lokasi.....	37
a. Keadaan fisik.....	37
b. Keadaan penduduk.....	37
B. Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pola P2BPK	41
a. Pelaksanaan	41
b. Kondisi Permukiman.....	52
1. Kondisi Permukiman Sebelum Pernataan Lingkungan ..	52
2. Kondisi Permukiman Sesudah Penataan Lingkungan	59
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi.....	71
C. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	74

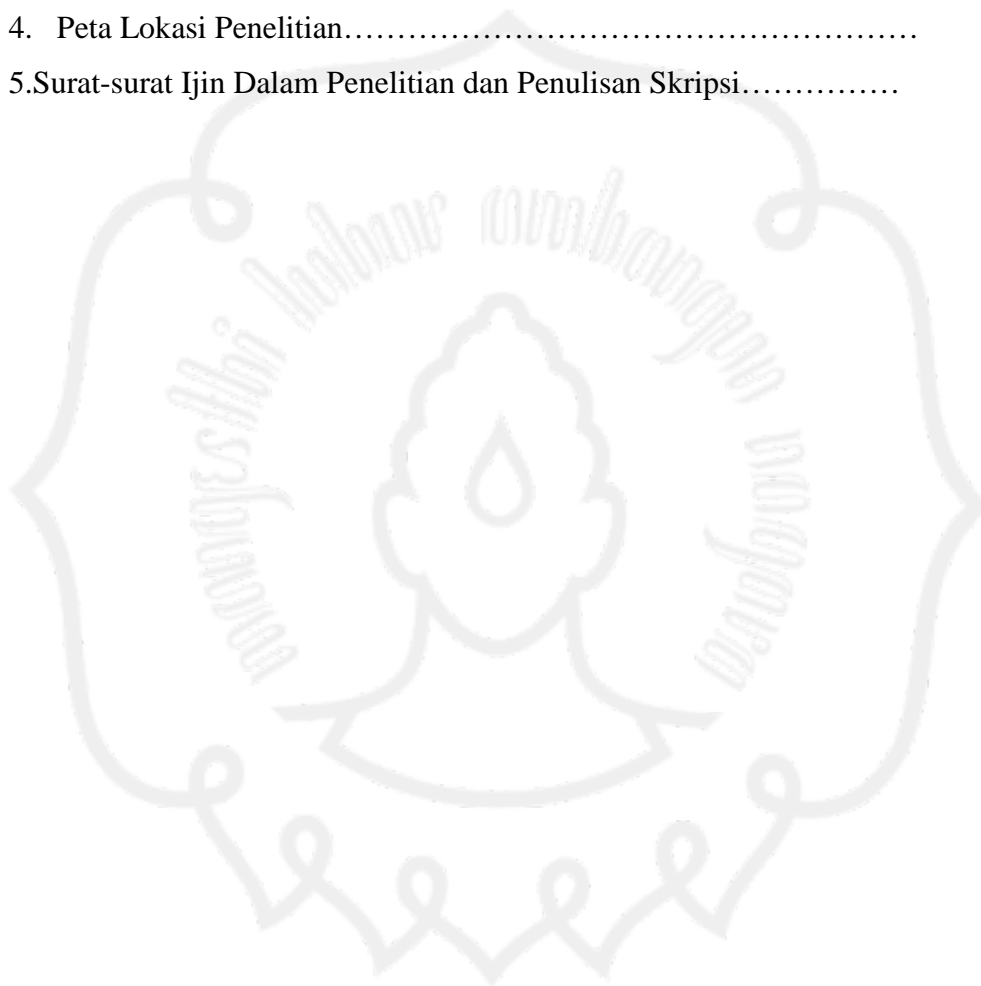
DAFTAR TABEL

Tabel No :

1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kelurahan Mojosongo 2002 44
2. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Mojosongo 2002 45
3. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan Mojosongo 2002 45
4. Rekapitulasi Pembiayaan perorang paguyuban P2BPK Mojosongo Berseri II RT 03 RW VII..... 47
- 5.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran No :	Halaman
1. Daftar Wawancara.....	
2. Daftar Responden Mojosongo Berseri I.....	
3. Daftar Responden Mojosongo Berseri II.....	
4. Peta Lokasi Penelitian.....	
5. Surat-surat Ijin Dalam Penelitian dan Penulisan Skripsi.....	



DAFTAR GAMBAR

Gambar No :	Halaman
3. Struktur kelembagaan pelaksanaan kegiatan P2BPK	30
4. Struktur organisasi panitia pembagunan kelompok P2BPK.....	31
5. Bagan Kerangka Pemikiran	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan yang telah berjalan selama ini menghasilkan kecenderungan terjadinya restrukturalisasi ekonomi yang mengarah pada makin meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa secara relatif terhadap sektor pertanian. Pertumbuhan kota yang cepat berimplikasi pada pembangunan infrastruktur dasar pelayanan publik. Masalah yang cukup besar antara lain adalah kekumuhan pada kawasan dengan tingkat kegiatan perekonomian tinggi yang menuntut penyediaan lahan hunian bagi pelaku-pelaku kegiatan perekonomian tersebut.

Pembangunan mempunyai ruang lingkup yang luas pada setiap tahap di harapkan dapat dicapai keselarasan dan kemajuan lahiriah dan batinhiah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat. Dengan demikian, pembangunan meruakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus. Dalam GBHN dijelaskan bahwa hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Artinya pembangunan mencakup kemajuan lahiriah, kemajuan batinhiah serta kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup yang berkeadilan sosial.

Pembangunan Indonesia yang pada teorinya berdasarkan pada UUD 1945 dan prinsip pemerataan kemakmuran bagi seluruh daerah dan rakyat Indonesia berkembang agak menyimpang dari cita-cita semula. Hampir semua jenis pembangunan dan modernisasi terpusat di kota-kota besar, sedangkan desa dan kota-kota kecil yang ada di sekelilingnya mengalami perkembangan pembangunan yang cukup lambat .

Perkembangan ini meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa di kawasan perkotaan. Pertumbuhan yang pesat di perkotaan terjadi sebagai akibat adanya akumulasi investasi, sumber daya manusia, infrastruktur ekonomi seperti lembaga keuangan, jasa telekomunikasi dan informasi. Dengan keadaan ini timbullah suatu gerakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka bermukim di kota dan memiliki kegiatan ekonomi yang lain dari kegiatan sewaktu mereka masih berada di desa. Pada gilirannya proses ini akan makin meningkatkan urbanisasi yang akan makin memperbesar beban perkotaan.

Masalah urbanisasi merupakan masalah yang makin menyulitkan para penata kota, karena berduyun-duyunnya orang-orang dari desa-desa ke kota besar yang seakan-akan memberikan tawaran dan jaminan kesempatan berusaha dan hidup yang lebih baik dan menyenangkan ternyata menimbulkan masalah-masalah baru dalam kota yang belum pernah di hadapi atau di bayangkan sebelumnya. Urbanisasi yang terjadi tanpa di sertai industrialisasi yang memadai, lapangan kerja yang cukup ataupun pengupahan yang pasti, telah menjadikan penduduk perkotaan mempunyai kondisi perumahan yang kualitas nya rendah . Masalahnya menjadikan di persulit karena kurangnya dana bantuan pemerintah untuk pembangunan perumahan, harga tanah yang membumbung tinggi karena kebutuhan dan perbuatan spekulasi. Serta oleh karena di dirikan nya pembangunan real estate yang dalam membangun perumahan lebih menguntungkan golongan penduduk kelas menengah dan atas.

Berjubelnya penduduk pendatang ke lokasi-lokasi kota lama, daerah perkampungan atau membangun gubug-gubug liar jelas semakin hari akan melampaui daya dukung tempat-tempat tersebut, akibatnya daerah-daerah tersebut akan menjadi padat ,bangunan-bangunan makin parah dan tidak lagi mencukupi kebutuhan. Terjadinya penyempitan sungai –sungai karena tebingnya ditumbuhi bangunan-bangunan darurat dan liar benar-benar merupakan sumber banjir di musim penghujan. Program pengembangan perumahan untuk penduduk berpendapatan menengah sering kali di usahakan oleh serikat kerja atau organisasi golongan pekerja khusus yang dengan sendirinya tak akan mencakup kelompok kerja sektor informal. Kebutuhan akan perumahan yang murah dalam kaitannya

dengan pertumbuhan penduduk urban yang cepat seringkali di penuhi oleh program pengadaan rumah sewa yang tidak sah.

Kemerosotan fisik lingkungan, masalah pengangguran dan gelandangan, meningkatnya kemacetan dan kriminalitas, dan makin terasa panasnya kota-kota di balik makin seringnya terjadi bencana banjir merupakan masalah baru yang secara nyata harus di hadapi oleh para penata kota yang tidak biasa menghadapi perkembangan yang tak terduga itu. Permasalahan permukiman memang menarik untuk di telaah, karena tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Permasalahan ini tidak dapat di pisahkan dengan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dalam skala regional maupun nasional. Baik di negara –negara yang sedang berkembang maupun negara-negara yang sudah maju, permasalahan permukiman selalu mendapat prioritas pemecahan yang tinggi. Oleh karena itu banyak sekali literatur ataupun artikel yang menyoroti permukiman manusia ini dan permasalahannya, serta sekaligus membahas upaya-upaya alternatif untuk pemecahannya. (Drakakis-Smith, 1980; Payne, 1977). Permasalahan permukiman di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, dan khususnya di Indonesia memang mencerminkan akibat-akibat keterbelakangan pembangunan, dan sekaligus merupakan masalah yang menyertai lajunya perkembangan itu sendiri. Keterbelakangan pembangunan menimbulkan akibat-akibat terhadap permukiman manusia dan lingkungan hidup. Tanpa adanya penanganan yang serius terhadap masalah ini, keadaan lingkungan permukiman manusia cenderung memburuk karena pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari pada upaya penambahan perumahan dan penambahan fasilitas-fasilitas pelayanan umum, serta kurang berfungsinya badan-badan perencana yang ada.

Kota Surakarta mengalami pertumbuhan kota yang cepat. Menurut data yang ada kota Surakarta pada tahun 1997 memiliki jumlah penduduk 539.387 jiwa dengan jumlah rumah penduduk 115.165 rumah, dengan luas 4.404 Km. Kepadatan penduduk rata-rata 12.248 jiwa per Km dengan laju pertumbuhan penduduk kurang lebih 0,6% pertahun yang akan bertambah tiga kali lipat pada siang hari. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka kota Surakarta termasuk kota

besar menuju kota metropolitan. Dengan adanya keadaan yang seperti itu dan adanya keterbatasan dan tingginya harga lahan perkotaan di Surakarta telah mendorong sebagian masyarakat untuk memanfaatkan lahan bantaran Kali Anyar dan tanah-tanah negara sebagai tempat permukiman yang tidak terencana dan liar, menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang kemudian bermuara pada kekumuhan.

Salah satu skenario pengembangan kawasan perencanaan adalah pengembangan perumahan, adapun tujuan pembangunan perumahan adalah untuk menata daerah yang kumuh secara fisik menjadi hunian yang lebih rapi, tertata dan memenuhi persyaratan rumah sehat. Pengadaan perumahan dapat di tempuh melalui cara antara lain dengan pembangunan perumahan melalui kelompok atau yang di sebut dengan Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK). Program P2BPK salah satunya beradadi lokasi RT 03 RT 01 dan RT 03 RW VII Kelurahan Mojosongo. Lokasi ini berada di Bantaran sungai Kali Anyar yang statusnya merupakan tanah milik negara di bawah pengawasan pemerintah kota Surakarta. Warga RT 03 RW 1 dan RT03 RW VII tersebut telah bersepakat untuk bergabung dalam satu kelompok swadaya masyarakat yang bernama kelompok Mojosongo Berseri 1 dan kelompok Mojosongo Berseri II untuk membangun kembali perumahan secara kooperatif, dan mengusulkan untuk membangun perumahan dengan menggunakan pola P2BPK.

Pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif baru dalam pembangunan di mana masyarakat di beri hak untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk membangun masyarakatnya. Hal ini di karenakan pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut dengan lebih memberi kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri.

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti kegiatan penataan lingkungan permukiman perkotaan dengan menggunakan pola yang bertumpu pada kelompok yang di mulai sejak bulan Januari 1996 dan baru selesai pada pertengahan September 1999. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui

penanganan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Mojosongo dan untuk mengetahui kondisi permukiman tersebut setelah adanya program P2BPK. Hal ini sangat di perlukan karena hasilnya nanti bisa di jadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi instansi terkait, dan mungkin bisa juga sebagai percontohan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan selanjutnya.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah pernyataan yang di susun secara rinci berdasar identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah penanganan permukiman kumuh dengan pola pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok (P2BPK), kelompok Mojosongo berseri I dan kelompok Mojosongo berseri II, Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah keadaan atau kondisi permukiman setelah adanya program P2BPK tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanganan permukiman kumuh berdasarkan pola pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok (P2BPK), kelompok Mojosongo berseri I dan kelompok Mojosongo berseri II, Kelurahan Mojosongo kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kondisi permukiman setelah adanya program P2BPK tersebut di lihat dari manfaat yang di peroleh dan pengaruhnya terhadap perilaku kelompok sasaran.

D. Manfaat Penelitian

Seorang peneliti yang mengadakan penelitian pasti mempunyai harapan bahwa nantinya hasil penelitian yang ditulis akan mempunyai kegunaan, baik itu kegunaan praktis maupun teoritis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan ilmu pada umumnya dan ilmu pengetahuan geografi pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Setelah diadakan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan percontohan dalam melanjutkan dan meningkatkan mutu pelaksanaan P2BPK di wilayah setempat maupun wilayah lainnya.

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Permukiman Kumuh

a. Pengertian

Ada dua istilah yang berkaitan dengan studi permukiman, yaitu istilah “permukiman” dan istilah “pemukiman”. Dari segi etimologis keduanya mempunyai asal kata yang sama yaitu kata dasar “mukim” yang berarti tempat tinggal atau sekelompok penduduk (Purwadarminta, 1966).

Permasalahan dalam pembentukan kata permukiman dan pemukiman terletak pada perbedaan imbuhan dan arti yang dihasilkan (Ndang Sudaryat dan

Hanapi Natasasmita, 1986, Gorys Keraf, 1978). Kata permukiman mempunyai imbuhan per-an dan kata permukiman mempunyai imbuhan pe-an. Baik per-an maupun pe-an mempunyai fungsi membentuk kata benda. Di antara beberapa arti yang di bentuk oleh imbuhan per-an, ternyata yang paling tepat untuk kata permukiman adalah “tempat ber-“, tempat bermukim, sedang arti imbuhan pe-an pada kata pemukiman mempunyai arti kata pemukiman banyak berkaitan dengan cara-cara memukimkan atau proses memukimkan (menempati) tempat-tempat tertentu. Kata pemukiman banyak bersangkut paut atau berkaitan dengan cara-cara memukimkan atau proses memukimkan manusia atau binatang, dan dapat pula berarti proses memukimi tempat-tempat tertentu. Apabila permasalahannya dikaitkan dengan upaya pemerintah ataupun badan-badan tertentu, untuk memindahkan sekelompok penduduk dari daerah tertentu ke daerah tertentu yang baru, maka pengertian permukiman lebih cocok. Berdasarkan uraian diatas mengenai makna arti pemukiman dan permukiman diatas, dapat di simpulkan bahwa keduanya mempunyai sorotan pembahasan yang berbeda tetapi masih mempunyai hubungan yang sangat erat. Kesimpulannya, pengertian permukiman secara luas mempunyai arti perihal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal, dan secara sempit berarti daerah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal. Sedangkan pemukiman banyak berkaitan dengan upaya untuk memukimkan atau proses memukimkan serta proses memukimi. Upaya pemukiman berhubungan dengan kepentingan manusia untuk memperoleh tempat tinggal, tetapi dapat pula ditujukan untuk sekelompok binatang tertentu.

Menurut Kamaluddin, 1983, permukiman merupakan konsentrasi perumahan beserta fasilitas-fasilitas lingkungannya sebagai tempat kelangsungan hidup manusia. Menurutnya, masalah permukiman di perkotaan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan dimensi sosial, ekonomi, politik dan kondisi lingkungan fisiknya. Apabila beberapa dimensi tersebut tidak diperhatikan, maka perkotaan akan semakin bertambah banyak permukiman

kumuh dan hunian liar yang tidak mengikuti pola-pola tarta ruang, prosedur perijinan dan status kepemilikan tanah.

Menurut Parawangsa (1995 : 42), permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni baik akibat kurangnya fasilitas dan sarana penunjang layaknya permukiman, seperti pendidikan, jalan, penerangan, air bersih dan sebagainya maupun akibat kurang layaknya bentuk bangunan, seperti rendahnya sanitasi (sirkulasi udara yang rendah, sampah yang tidak terurus, saluran limbah yang tidak lancar), padatnya permukiman rumah dan penduduknya yang padat. Secara ringkas Effendi (1993:103), menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman dengan kondisi fisik perumahan yang terlalu padat, fasilitas yang tidak memadai serta sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal.

Secara konseptual, terdapat perbedaan yang tegas antara permukiman kumuh dengan permukiman liar. Permukiman kumuh tidak selalu liar, begitu juga sebaliknya, permukiman liar belum tentu kumuh. Permukiman liar dihubungkan dengan status kepemilikan yang tidak jelas, sedangkan kumuh cenderung pada aspek lingkungan dan fasilitas yang ada (Judohusodo,1991:1). Permukiman kumuh merupakan permukiman bagi penduduk miskin yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor informal. Penduduk miskin bekerja keras, dengan jumlah jam kerja yang panjang dengan tujuan untuk dapat mencukupi kebutuhan pokok. Permukiman kumuh adalah bentuk dari permukiman yang tidak terencana, tidak di organisasikan dan kekurangan atau fasilitasnya tidak memenuhi standar (Drakakis Smith,1980).

Lingkungan permukiman yang baik adalah kumpulan beberapa fasilitas dan infrastruktur, diantaranya : jumlah dan persediaan air dan jaringan drainase, tersedianya pasar,pusat perbelanjaan, sekolah, daerah rekreasi, taman, kantor, dan juga di lengkapi dengan metode yang baik dari penataan lingkungan yang tepat dan adanya peraturan tentang kebersihan. Perumahan di ambil untuk menggantikan tempat untuk tinggal sebagai titik akhir dari macam ranting kehidupan dengan mendirikan lingkungan permanen .

Secara umum lingkungan kumuh dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

- 1). Daerah slum, merupakan lingkungan hunian yang legal, tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman. Dan daerah slum ini menurut definisi PBB diartikan sebagai daerah hunian yang legal (status hukumnya jelas) yang kondisinya merosot.
- 2). Daerah squatter yaitu ruang-ruang terbuka (open space) yang di tempati oleh permukiman-permukiman liar. Pada umumnya, lingkungan permukiman kumuh berada di atas tanah negara, tanah perorangan, badan hukum atau tanah yayasan yang belum di bangun pemilikinya. Atau dapat di katakan daerah squatter adalah daerah atau lahan yang di duduki perumahan secara liar, gubug-gubug liar ini umumnya di bangun di atas lahan yang tidak jelas pemilikannya., atau lahan negara dan akan makin meluas menempati lahan-lahan kosong.

Daerah “slum” dan “squatter” dalam kota inilah yang biasa di juluki sebagai kawasan kumuh yaitu daerah yang kepadatan baik penduduk maupun bangunannya sudah melebihi daya dukung lingkungan.

b. Karakteristik Permukiman Kumuh

1. Karakteristik Fisik

Karakteristik fisik dari permukiman kumuh dapat di kelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. Desa dalam atau dekat dengan pusat kota .

Karakteristik dari lokasi ini adalah pengaruh bisnis sendiri dari toko-toko kecil dan kombinasi antara tempat permukiman serta pekerjaan.

- b. Permukiman kumuh dikota pada daerah terlarang seperti rel kereta api dan tanah kuburan, tepi sungai yang dibuat untuk mengatasi masalah banjir yang berpuluh-puluh tahun telah mengganggu kota Surakarta.

- c. Permukiman kumuh di pinggiran kota mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Masyarakat menyerupai populasi kota dimana imigran ini berasal.

- Tidak mempunyai semua fasilitas seperti suplai air bersih, listrik, wc umum
- Populasi 100% bergerak dibidang sektor informal dengan rendahnya pendapatan perkapita
- Mereka umumnya ditemukan di dekat pembuangan sampah dan dalam suatu kasus kota yang mempunyai sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo, seperti ditemukan di tepi sungai

2. Karakteristik non fisik

a. Kualitas hidup sosial budaya penduduk permukiman kumuh dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- Kepribadiannya tinggal diluar artinya situasi dimana penduduk tidak suka tinggal di dalam rumah, mereka suka tinggal sendiri di sepanjang jalan atau pasar
- Sistem keluarga dalam kasus ini sistemnya didukung oleh jiwa komunal

b. Standar kehidupan didasarkan pada status ekonomi penduduknya, status ini yaitu :

- Karena penduduk yang mempunyai status pekerjaan yang rendah, sebagai buruh biasa, tukang becak, kurir, dan tanpa bentuk formal lain dari pemeliharaan, mereka di klasifikasikan sebagai kelompok berpendapatan rendah
- Karena rendahnya pendapatan, mereka berjuang mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, di sisi lain kerja sampingan sebagai contoh tukang becak, membuka kios sementara dan juga lainnya

c. **Kriteria Permukiman Kumuh**

Lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1). Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yaitu kurang atau tidak tersedianya prasarana, fasilitas dan utilitas lingkungan.
- 2). Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang di gunakan adalah bahan bangunan yang bersifat semi permanen
- 3). Kepadatan bangunan dengan KDB yang lebih besar dari yang di ijinan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 500 jiwa/ha)
- 4). Fungsi-fungsi kota bercampur dan tidak beraturan

Judohusodo (1991 : 4), dan Samuel (1991) memberikan beberapa kriteria permukiman kumuh, yaitu :

1. Bentuk hunian kurang teratur, tidak berstruktur, tidak berpola serta kurang tersedianya fasilitas umum dan sarana permukiman serta bentuk fisik yang kurang layak (bersifat reguler dan sering terlanda banjir).
2. Tingkat kepadatan penduduk lebih dari 600 jiwa/Ha.
3. Lahan di daerah tersebut biasanya dipergunakan untuk kegiatan usaha kecil.
4. Warganya bekerja pada sumber-sumber nafkah golongan penghasilan rendah.
5. Biasanya dihuni oleh migran tetap dan tidak tetap.
6. Sanitasi rendah (sirkulasi rendah, sampah tidak terurus, serta penyediaan air bersih kurang).

Urbanisasi yang sering terjadi di Indonesia yang bergerak secara sporadis, anarkis, tak terorganisasi, pertumbuhan hunian perkotaan yang tak terencana dan faktor ketidak mampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh perumahan layak dalam lingkungan hunian yang manusiawi serta keterbatasan daya dukung perkembangan pada perkotaan adalah merupakan sebagian faktor yang berpengaruh dalam proses kekumuhan di sebagian wilayah kotamadia Dati II Surakarta ini., pada umumnya dan di sebagian wilayah Kelurahan Mojosongo pada khususnya. Adapun kriteria kondisi wilayah kumuh yaitu sebagai berikut :

Kondisi Fisik Lingkungan

Permukiman

Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian besar penduduk dalam mendapatkan lahan perumahan yang layak dan kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan perumahan yang baik sehingga yang terlihat adalah sebagian penduduk tersebut mendirikan bangunan dan menciptakan lingkungan permukiman menurut kemampuan dan pengetahuannya tanpa memperhatikan aspek legal atau kualitas lingkungan yang terjadi.

Prasarana lingkungan

1. Jalan

- Jalur jalan agar intensitas kegunaan kawasan tinggi, penggunaan ruas jalannya belum dipisahkan secara jelas yaitu antara jalur kendaraan, jalur pejalan kaki, dan area parkir, sehingga pada jam sibuk sering terjadi kesemrawutan.
- Jalan-jalan dikawasan pemukiman yang dihuni kelompok ekonomi lemah masih banyak berupa tanah asli yang kurang memenuhi syarat, serta tidak terpola.

2. Drainase

- Beberapa saluran tidak mampu menampung debit air hujan karena masih banyaknya tanaman bambu yang menghambat aliran air disaluran tersebut.
- Banyak kotoran / sampah disepanjang saluran.
- Banyak saluran alami yang dinding salurannya belum diperkuat, sehingga rentan terhadap bahaya longsor.

3. Limbah

Terdapat unit-unit industri dan rumah tangga yang membuang cair berbau dan mengandung zat pencemar lainnya langsung ke saluran kota / lingkungan yang ada disekitar unit industri tersebut.

4. Fasilitas Umum

- MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan JAMAK (Jamban Komunal) belum memadai dengan jumlah penduduk pemakai sebab sebagian besar warga khususnya warga dipinggiran sungai masih memanfaatkan sungai sebagai kakus.
- PDAM
Beberapa lokasi belum terjangkau jaringan air bersih PDAM dan hanya memanfaatkan sumur-sumur yang kendalanya pada musim kemarau menjadi kering. Tetapi sebagian masyarakat yang terjangkau jaringan PDAM telah menjadi pelanggan air bersih setelah terdapat reservoir kecil untuk kepentingan umum, namun jumlah tersebut belum memadai.
- TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara)
Terbatas jumlahnya dan TPS yang dibuat oleh masyarakat melalui proyek mikro tidak berfungsi secara maksimal karena tidak terjangkau oleh armada DKP selain itu pihak Pemda berusaha mengurangi jumlah TPS di kotamadia Dati II Surakarta untuk meningkatkan nilai dalam penilaian ADIPURA.
- Parkir Kendaraan
Masih menggunakan badan-badan jalan, sehingga mengurangi badan jalan atau mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Terutama didepan Pasar Mojosongo dan perkotaan sekitarnya.

- Tempat Kegiatan Umum (Tata hijau dan Ruang terbuka)

Keberadaan pohon dan tanaman hias sebagian besar adalah kesadaran pribadi dari masyarakat. Belum ada ruang terbuka untuk rekreasi bagi masyarakat untuk melakukan olah raga dan interaksi sosial.

Kondisi Sosial dan Budaya

Pada awalnya penduduk kawasan perencanaan mulai bermukim di kawasan ini. Sejak ada peternakan babi dan bekerja sebagai pekerja di peternakan babi tersebut. Untuk memperlancar usahanya, para pemilik tersebut menyediakan fasilitas perumahan sekedarnya bagi mereka. Usaha peternakan babi kemudian bersimbiosis mutualisme dengan home industri tahu dan tempe. Bentuk simbiosis ini, berupa pemanfaatan limbah tahu dan tempe untuk pakan ternak babi. Hal ini untuk menambah pendapatan masyarakat pembuat tahu dan tempe.

Kelembagaan

Kelembagaan dalam kawasan perencanaan secara umum mengikuti struktur lembaga pemerintahan yang ada yaitu RT dan RW. Selain itu, telah pula ada beberapa kelembagaan informal (Karang Taruna, Dasa Wisma dll) yang dibentuk berdasarkan ikatan kegiatan sosial, usaha dan ikatan keagamaan.

Kepemimpinan

Salah satu aspek penting dalam kegiatan sosial adalah pola kepemimpinan dalam masyarakat. Selain pemimpin formal yang telah disahkan oleh pemerintah, terdapat pula beberapa tokoh informal (Tokoh agama dan sesepuh masyarakat) yang secara informal dihormati dan disegani anggota masyarakat.

Konsentrasi Kegiatan

Kegiatan penghuni kawasan perencanaan terkonsentrasi pada beberapa tempat sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan antara lain kegiatan pemerintah, pariwisata, perdagangan, industri rumah tangga dan industri besar.

Kondisi Sosial Ekonomi

Kriteria dan ciri khas dari warga dalam kawasan perencanaan adalah :

- Penduduk yang berprofesi sebagai buruh bekerja pada industri rumah tangga dan pabrik yang ada dalam kawasan perencanaan antara lain : pabrik plastik, kertas rokok, air aki, roti (makanan kecil), kerupuk, rambak dan mihun.,
- Mata pencaharian yang cukup merata dan tersebar pada hampir semua RT dalam kawasan perencanaan adalah pengkrajin sangkar burung.
- Penduduk yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan atau instansi pemerintahan dan swasta formal lainnya menyebar pada hampir semua RT dengan kuantitas yang relatif kecil.
- Penduduk yang bermata pencaharian sebagai pembuat tahu dan tempe dapat ditemukan pada lokasi-lokasi yang berdekatan dengan bekas kandang babi. Hal ini dulu dikaitkan dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pembuat tahu dengan peternakan babi.
- Berdagang makanan kecil merupakan salah satu jenis mata pencaharian yang banyak dilakukan penduduk khususnya yang bermukim dibantaran sungai Kali Anyar. Makanan kecil yang dibuat jajan pasar, baik dijual sendiri maupun disetor ke pedagang.
- Jenis mata pecaharian lain yang terdapat dalam kawasan perencanaan adalah pedagang, toko kelontong dan pedagang

pasar. Pedagang toko banyak terdapat disekitar jalan Brigjen Katamso, khususnya yang berdekatan dengan pasar.

d. Proses Terjadinya

Perumahan merupakan masalah bagi para manula karena perumahan adalah kebutuhan dari manusia setelah makan dan pakaian. Selain menjadi tempat tinggal, tempat istirahat, rumah juga sebagai simbol dari kepemilikan status sosial untuk hal-hal tertentu. Sejauh ini masalah perumahan selalu berkembang dengan majunya kebudayaan. Menurut Gee T.M. (1979) masalah perumahan tidak hanya menyediakan perumahan yang kecil, rendahnya kualitas perumahan yang tersedia dengan rendahnya fasilitas tapi juga berhubungan dengan tersedianya kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan, peningkatan pendidikan dan kekuatan dari PEMDA.

Ada beberapa teori yang menjelaskan terjadinya pemukiman kumuh, diantaranya yaitu:

1. Teori Marginal

Yang menjelaskan bahwa daerah kumuh ada karena ketidakmampuan dari migran untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan hidup di kota yang baru baginya, oleh karena itu kondisi ini memaksa mereka untuk hidup di dalam lingkungan sosial dan ruang yang terisolasi sebagai contoh mereka cenderung menggunakan bentuk karakter gaya pedesaan. Sehingga mereka hidup di bawah garis kemiskinan karena ketidakpercayaan mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka juga tidak mempunyai kontak sosial dengan institusi lain yang dapat menolong mereka untuk merubah gaya hidup mereka bahkan mereka mengembangkan cara-cara usaha yang dapat dicoba oleh mereka untuk mendapatkan jatah makan. Hal ini menjadikan himbuan para penguasa untuk menopang hidupnya, oleh karena itu mereka menjadi yakin akan hidup, lebih dari itu para imigran baru yang berasal dari daerah yang sama berkumpul sampai berbagi keuntungan yang sama dan sampai sekarang masih berlanjut. Proses sosial ini Lewis

katakan sebagai budaya kemiskinan (Oscar Lewis dalam lingkungan kemiskinan 1966).

2. Teori Struktural

Mejelaskan adanya daerah kumuh karena ketidakmampuan menyediakan lapangan pekerjaan dan fasilitas umum yang memenuhi standar bagi penduduk migran. Ini juga merupakan bukti bahwa terjadinya migran karena rendahnya ketrampilan yang ada pada diri mereka tidak dapat diserap pada sektor formal yang ada dikota. Tapi sebagian kecil dari penduduk migran disediakan tanah yang subur untuk migran dari penduduk pedesaan yang optimis didalam mendapatkan pekerjaan (Todaro dan Stilkind, 1985).

Permukiman kumuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sumka (1987: 171) mengatakan bahwa kota-kota besar didunia telah di bebani dengan tuna wisma dan penghuni permukiman kumuh yang jumlahnya mencapai 30-50% dari penduduk kota. Pada tahun 2000 jumlah mereka meningkat menjadi sekitar dua pertiga dari seluruh penduduk kota.

Pembangunan kota yang baik menjadi daya tarik untuk terjadinya perpindahan dari desa-kota. Bentuk dari migrasi ini merupakan elemen yang penting menjelang proses urbanisasi yang dibalik itu terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif meliputi ekspansi dari tenaga kerja dimana dapat merangsang aktifitas industri. Dilain pihak dampak negatif jadi masalah dalam migrasi yang tidak didukung oleh ketersediaan lapangan pekerjaan, untuk migran yang mempunyai skill yang rendah. Ini merupakan akibat dari proporsi yang besar dari komunitas orang miskin didaerah perkotaan (Todaro, 1969). Karena pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan perkapita, orang-orang ini tidak dapat kembali kedesanya dan oleh karena itu untuk menopang kehidupan, mereka menaruh harapan dalam aktifitas-aktifitas informal dan karena dari sumber keterbatasan ini, perumahan menjadi masalah, oleh karena itu mereka mendirikan bangunan sederhana sebagai atap –ini dinamakan “ kelahiran “ pemukiman kumuh.

Menurut Mc Gee (1971), munculnya permasalahan sosial dan kantong-kantong permukiman miskin di kota merupakan akibat dari urbanisasi semu yaitu urbanisasi yang tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi dan

industrialisasi. Urbanisasi seperti ini akan menyebabkan involusi kota, artinya penduduk miskin di perkotaan atau pelaku migrasi desa-kota yang miskin di dorong masuk ke sektor tertier sebagai akibat ketidakterediaan peluang kerja. Akhirnya perubahan struktur ekonomi, urbanisasi dan perkembangan kota yang tidak terkendali akan mendorong pekerja miskin bertempat tinggal di daerah-daerah yang keadaan fisik perumahan terlalu padat dengan fasilitas yang kurang memadai. (Effendi, 1993:102). Kota Surakarta menghadapi transformasi perkotaan yang cepat dengan rencana pembangunan perkotaan dan rencana pembangunan wilayah. Dengan pertumbuhannya, rencana dan komitmen-komitmen pembangunan di harapkan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan perkotaan di Surakarta.

Proses pengkumuhan yang terjadi di kota Surakarta seringkali berlatar belakang permasalahan ekonomi dan berkembang di pusat-pusat aktifitas perekonomian kota.

Todaro dan Stillkind (1991:10) menyatakan bahwa adanya pembangunan yang cenderung menguntungkan kota akan menarik dan merangsang penduduk desa untuk pindah ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di dasari oleh anggapan adanya pekerjaan yang banyak dan penghasilan yang lebih tinggi dari pada pekerjaan dan penghasilan yang ada di desa. Banyak harapan-harapan baru yang tidak tersedia di desa, sehingga penduduk desa memutuskan untuk migrasi ke kota. Ironisnya, sebagian besar pelaku migrasi mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah sehingga mereka tidak dapat tertampung pada sektor formal. Kenyataan ini mengharuskan mereka untuk bekerja seadanya, pada lapangan usaha yang tidak membutuhkan pendidikan serta ketrampilan yang tinggi, misalnya masuk ke dalam sektor informal (Adams, 1995:61). Berkaitan dengan tempat tinggal, pelaku migrasi tersebut menumpang di rumah sanak saudaranya atau temannya yang telah lebih dahulu tinggal di kota. Bagi para pelaku migrasi yang tidak mempunyai sanak saudara di kota, terpaksa membuat rumah pada lahan-lahan kosong, pinggir kali, atau pekuburan dengan bahan seadanya sekedar sebagai tempat tinggal. Kondisi ini tentu saja menyebabkan permasalahan tersendiri dalam hal permukiman, seperti kepadatan permukiman, meluasnya permukiman kumuh, semi kumuh, dan daerah hunian liar (parawangsa, 1990:34).

Robert (1978: 137-140) mengungkapkan bahwa pesatnya migrasi desa-kota cukup beralasan apabila di pandang sebagai salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh. Pelaku migrasi biasanya hanya mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah serta berasal dari penduduk berpenghasilan rendah. Kualitas penduduk yang rendah ini apabila didukung oleh perilaku-perilaku tradisional (malas, hidup tidak sehat, menyerah pada nasib), MAKA AKAN TERCIPTA POLA-POLA HIDUP MISKIN DAN BUDAYA KEMISKINAN. Untuk meminimalkan biaya hidup, mereka menempati daerah-daerah yang mempunyai pengolahan minimal misalnya lahan-lahan kosong, pekuburan, pinggir sungai. Permukiman yang di dirikan biasanya tidak mengikuti pola-pola tata ruang, prosedur perijinan dan status kepemilikan tanah. Dengan demikian dapat di ungkapkan bahwa masyarakat hunian liar dan permukiman timbul sebagai akibat pesatnya migrasi desa-kota yang tidak di ikuti penambahan fasilitas yang ada di perkotaan. (Taylor, 1972 :750).

Kekumuhan pada kawasan dengan tingkat aktifitas perekonomian tinggi di mulai dari tuntutan akan lahan hunian yang mendesak terutama bagi pelaku-pelaku aktifitas perekonomian tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut di atas terutama masalah krisis yang lahan di bagian selatan pusat kota yang perkembangannya sangat pesat, baik di bidang perumahan, perdagangan maupun fasilitas umum. Mengakibatkan daerah-daerah tersebut terjadi pergeseran

fungsi dari daerah perumahan yang padat berubah menjadi daerah perdagangan/usaha. Hal ini membawa dampak jaringan kerja dan pola pergerakan kawasan menjadi tidak jelas atau kacau. Kekacauan inilah yang akan menjadi awal tumbuhnya kawasan kumuh. Sedangkan daerah-daerah di luar pusat kota terutama di bagian utara kota berkembang menjadi satelit pusat kota yang berfungsi mendukung kegiatan dan kegiatan kota sehingga di harapkan terjadi keseimbangan pembangunan daerah-daerah tersebutmulai mengadakan perbaikan lingkungan baik dengan peremajaan kota, pembangunan fasilitas kota.

Keterkaitan antara pusat aktifitas dan hunian berhubungan dengan efisiensi jarak, waktu, dan biaya transportasi kegiatan yang menjadikan intervensi aktifitas perekonomian masuk ke hunian kawasan, membawa dampak jaringan kerja dan pola pergerakan kawasan menjadi tidak jelas atau kacau. Kekacauan inilah yang akan menjadi awal tumbuhnya kawasan kumuh.

e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh

Secara teoritis, terjadinya permukiman kumuh dan daerah hunian liar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Perpindahan penduduk desa-kota yang pesat merupakan penyebab terjadinya permukiman liar, merosotnya kondisi hunian yang mereka tempati, serta kumuhnya kondisi lingkungan fisik terutama bagi pendatang yang kondisi sosial ekonominya rendah (Judohusodo, 1991 : 4). Migrasi desa-kota dengan timbulnya permukiman kumuh dapat dijelaskan melalui rangsangan penduduk bermigrasi serta pelaku migrasi. Kondisi ini tentu saja menyebabkan permasalahan tersendiri dalam hal permukiman, seperti kepadatan permukiman, meluasnya permukiman kumuh, semi kumuh dan daerah hunian liar (Parawansa, 1990 : 32).
2. Yang penting dalam terjadinya permukiman kumuh adalah penghasilan (Silas, 1989). Penduduk miskin berpenghasilan rendah akan bersedia menurunkan standar hidupnya dengan bertempat tinggal di pemukiman kumuh. Pada daerah ini, penduduknya mempunyai pola hidup miskin, merupakan salah satu strategi agar secara ekonomi mereka dapat bertahan hidup dan mempunyai kesempatan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik (Suparlan, 1979 :12).
3. Yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh adalah perkembangan kota. Biasanya perkembangan kota terkait dengan industrialisasi, sehingga

pembanguinan kota cenderung bersifat kapitalistik, padat modal, banyak menggunakan lahan serta terkonsentrasi pada industri besar yang menggunakan teknologi tinggi (Robert, 1978 : 138, Manning, 1981 : 7). Perkembangan kota seperti itu akan merugikan penduduk miskin di kota maupun pelaku migrasi desa-kota yang hanya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Kebanyakan dari mereka terpaksa masuk ke dalam sektor informal maupun bekerja sendiri. Akhirnya perkembangan dan modernisasi kota yang padat modal akan menggeser penduduk berpenghasilan rendah dari daerah-daerah produksi. Akibatnya, kota akan semakin marak dengan daerah permukiman kumuh dan hunian liar.

Selain tiga hal tersebut, penyebab kumuhnya suatu permukiman dapat dikaji dari aspek kesadaran terhadap lingkungan. Aktivitas penduduk miskin dalam kesehariannya sering merusak lingkungan, seperti pembuangan sampah yang tidak teratur, mandi dan mencuci di kali, membuat rumah dengan bahan seadanya, menjemur pakaian tidak teratur maupun kencing di sembarang tempat. Kebiasaan buruk ini apabila tidak dicegah dan dikendalikan, maka kondisi lingkungan dari daerah yang ditempati akan menjadi rusak (Judohusodo, 1991 : 4; Suparlan, 1991 : 8).

f. **Bentuk-Bentuk Penanganan Permukiman Kumuh**

Peremajaan kota mengenal beberapa metode penanganan yang dapat di terapkan sesuai kondisi dan permasalahan yang ada. Metode penanganan tersebut antara lain:

1). Pemugaran Rumah

Pemugaran diartikan pengembalian keadaan fisik seperti semula. Sebuah rumah yang sehat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adalah tersedianya ruang, ventilasi, penerangan, MCK. Apabila sebuah bangunan yang berfungsi sebagai rumah tempat kediaman manusia juga di tempati ternak maka rumah tersebut tentu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenaitu kegiatan pemugaran untuk kondisi ini adalah

membangun kandang ternak yang terpisah dari rumah dan tidak mengganggu kegiatan dan kesehatan penghuni rumah.

2). Program Perbaikan Kampung

Program perbaikan kampung merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perbaikan lingkungan permukiman secara fisik. Tujuan utama dari program ini adalah perbaikan kesehatan dan kondisi fisik lingkungan kampung.

3). Perbaikan Lingkungan Kawasan Pasar

Perbaikan lingkungan kawasan pasar adalah perbaikan prasarana lingkungan permukiman yang ada di sekitar pasar, yang dilakukan sebagai akibat adanya tambahan beban yang diterima masyarakat sekitar pasar karena tidak memiliki sarana pendukung. Pasar dan masyarakat sekitarnya adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan baik yang positif maupun yang negatif.

Strategi pengembangan tata ruang kota dan sektoral berdasarkan studi maupun program yang ada, kota Surakarta mengadakan penanganan permukiman yang terdiri dari beberapa skenario yang telah disusun, yaitu :

A. Skenario Pengembangan Perumahan

Pengembangan perumahan dilakukan dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu :

1. Perencanaan type rumah di arahkan agar menghindari terjadinya "Segregasi sosial" sehingga variasi type rumah yang akan dikembangkan harus dapat dikombinasikan untuk setiap penyediaan rumah.
2. Perencanaan penyebaran dan lokasi pengembangan disesuaikan dengan hierarki pola infrastruktur sehingga distribusi lahan dan kegiatan terkait dari skala lingkungan ke arah skala kawasan kota dapat terpenuhi.
3. Transformasi permukiman dari horizontal ke arah vertikal di arahkan pada suatu bentuk pemecahan yang mendasar terhadap masalah pengembangan hunian pada kawasan perencanaan walaupun masih dalam taraf dua lantai.

Sedangkan dalam pengembangan perumahan sebagai bagian dari pemanfaatan ruang usaha dilakukan dengan perkembangan :

1. Pengembangan fungsi rumah sebagai tempat kegunaan usaha di arahkan pada upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.
2. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan pada rumah sebaiknya pada skala hunian melayani lingkungan seperti salon, penjahit, warungan dan kios.

3. Integrasi antara hunian dan tempat usaha dalam kriteria jumlah lantai di arahkan pada pemanfaatan lantai dasar sebagai tempat usaha di lantai, di atas sebagai hunian.

Pola peragaan perumahan uang dilakukan mengarah pada beberapa konsep perumahan antara lain melalui :

- Housing suply / penyediaan rumah yang di lakukan melalui program pembangunan bertumpu pada kelompok.
- Rehabilitasi rumah dapat dilakukan meklalui pengambilan kredit bank/ melalui pola dana berantai/ revolving found.

B. Skenario Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pengembangan kawasan perumahan melalui kiomponen infrastruktur di lakukan dengan beberapa perkembangan perencanaan, pertimbangan yang mendasar dari perencanaan infrastruktur .

2.Skenario Pengembangan Sosial

1. Perlu di adakan beberapa pembinaan masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan berkaitan dengan masalah komunikasi sosial meliputi sistem administrasi dan sistem komunikasi yang lebih teratur dan lebih efisien.
2. Perlu di adakan pembinaan dan pelatihan kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan, ibi-ibu (pegawai,pkk), yang menjadi salah satu pendukung terciptanya pengembangan kreatifitas pembangunan lingkungan.
3. Di upayakan atau di sediakan sarana dan prasarana atau media untuk berkomunikasi baik secara formal maupun informal seperti tempat=tempoat pertemuan, dan pendukungnya, gardu siskamlainmg, papan pengumman, papan majalah dinding, sarana dan prasarana untuk berolah raga , berkesenian dan berorganisasi bagi para pemuda serta anak-anak.

3.Skenario Pengembangan Makro

Pengembangan kawasan di arahkan untuk lebih mengembangkan potensi yang telah ada sehingga lebih berdaya guna bagi kawasan itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa skenario yang akan di terapka yaitu :

1. Penataan lingkungan perumahan.
Peningkatan kualitas lingkungan perumahan di tempuh dengan beberapa cara antara lain pembangunan yang bertumpu pada kelompok.
- 2.Program kali bersih (Prokasih)
Program atau usaha yang di laksanakan agar wilayah kali dapat di kelola dan di pelihara oleh warga ekonomi lemah, khusus warga informal, sektor yang masih hidup dan berbudaya semi agricultur
2. Menciptakan ruang-ruang terbuka hijau
Optimalisasi ruang terbuka hijau ini adalah unt7uk menyediakan ruang trebuka yang nyaman untuk di nikmati oleh masyarakat kawasan perencanaan pada khususnya dan warga kotamadia dati II Surakarta pada umumnya. Optimalisasi ruang terbuka hijau ini di lakukan di sepanjang bantaran sungai,tepi drainase lingkungan sekitar wilayah pemakaman yang banyak berada di wilayah perencanaan .
3. Penataan wilayah perdagangan

Dilakukan di sepanjang jalan Brigjen Katamso, wilayah segitiga emas (Pasar Mojosoong sekitarnya) dan jalan MR. Sartono khususnya di RT 02 RW I dengan menyediakan akses yang mudah, fasilitas bangunan pendukung dan area parkir yang memadai.

4. Peningkatan Jalur Pelayanan Kawasan

Penanganan jalur pelayanan kawasan ini adalah untuk memberikan kemudahan serta pengamanan bagi masyarakat untuk menuju daerah lain dan kawasan perencanaan. Hal ini untuk membantu penyebaran beban transportasi pada jalan Brigjen Katamso dan menghidupkan daerah lain yang belum maksimal sarana dan prasarannya.

2. Program P2BPK

a. Pengertian

Program P2BPK adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni bagi warga masyarakat dalam rangka upaya pengembangan dan penataan lingkungan permukiman perkotaan. Dan dapat juga dikatakan program P2BPK yaitu kegiatan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dalam rangka upaya pengembangan dan penataan lingkungan permukiman perkotaan. Program P2BPK ini didasarkan pada pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat setempat yang berarti bertumpu pada kesiapan, kemauan, kemampuan dan kesiapan warga sendiri, tetapi di dalam batasan perencanaan makro pemerintah serta pendamping teknis oleh konsultan pendamping yang telah ada.

b. Tujuan

Program P2BPK ini diadakan dengan maksud dapat menopang dan meningkatkan kemampuan kawasan agar antisipatif terhadap keberlangsungan pembangunan di sekitarnya seiring dengan perkembangan kota serta memberikan sarana dan prasarana bagi warga untuk memperoleh perumahan yang layak sesuai dengan kemampuan, dengan tujuan :

- 1). Mematuhi aturan GSS (Garis Sempadan Sungai) Kali Anyar sesuai dengan PP No. 35 Tahun 1991 dan PERMEN PU No.63/PRT/1993.

- 2). Menata kembali bangunan dan prasarana setempat agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang layak dan legal dengan dukungan fasilitas fisik, sosial, serta budaya dan ekonomi kota Surakarta.
- 3). Meningkatkan sarana usaha ekonomi warga setempat untuk memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui dukungan usaha-usaha masyarakat dan membangun, merehabilitasi serta melengkapi fasilitas.
- 4). mengembangkan lokasi perencanaan sebagai pintu gerbang kota Surakarta di bagian utara dari arah timur dengan pertimbangan adanya ring road utara dan fokus pembangunan serta pengembangan perumahan ke arah utara kota Surakarta.
- 5). Pengalihan potensi budaya lokal sebagai salah satu daya tarik dalam meningkatkan kualitas masyarakat.
- 6). Meningkatkan potensi ekonomi warga dan perluasan keterampilan warga masyarakat sehingga dapat secara teknis menguasai kegiatan ekonomi alternatif lainnya.
- 7). Untuk membentuk proses peremajaan kota yang berkesinambungan dan dapat dilakukan berulang dalam kawasan yang direncanakan.
- 8). Untuk membentuk suatu pola lingkungan yang sehat, hal ini sejalan dengan tujuan pengurangan kemiskinan, karena kesehatan pemukiman terkait secara tidak langsung terhadap produktivitas.
- 9). Untuk memperkenalkan program-program pembangunan sosial ekonomi maupun disik melalui proses yang sistematis dan terpadu sehingga mengurangi kemiskinan, sekaligus merupakan pemecahan masalah yang mendasar terhadap permukiman kumuh.

b. Azas dan Prinsip Dasar P2BPK

1. Azas

Azas P2BPK meliputi

a). Azas Solidaritas

Azas ini sangat penting sebab melalui azas ini keterpaduan fokus kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku pembangunan menjadi jelas. Solidaritas tidak saja di tuntut antar anggota kelompok masyarakat tetapi juga antar masyarakat dan kerabat kerja pembangunan lainnya.

b). Azas Partisipasi

Setiap pelaku pembangunan terkait harus aktif sehingga terciptalah pola pembangunan partisipatif karena setiap pelaku bertindak secara aktif berlandaskan satu tekad yang telah di sepakati bersama.

c). Azas Kemitraan

Walaupun masyarakat tetap sebagai pelaku utama pembangunan, namun peran pelaku-pelaku pembangunan lain harus di dasarkan pada azas kemitraan sehingga terbentuk kerabat kerja pembangunan.

d). Azas Memampukan

Peran pelaku pembangunan lain masih sangat di perlukan agar apa yang tidak mungkin di capai pelaku utama (masyarakat) dapat di capai melalui pola ini, karena tidak semua sumber daya di miliki masyarakat seperti perijinan, teknologi, dana, dan peluang, serta kemudahan lain.

e). Azas Pemerataan

Azas ini menekankan pemerataan kesempatan dalam memanfaatkan peluang pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

2. Prinsip Dasar P2BPK

Dasar pelaksanaan P2BPK adalah dasar pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat setempat yang berarti bertumpu kepada kesiapan, kemauan dan kesiapan warga sendiri tetapi di dalam batasan perencanaan makro pemerintah serta pendampingan teknis oleh konsultan pendamping yang telah ada. Kegiatan ini termasuk usaha untuk membantu pemerintah

daerah, dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Selain ini tidak secara langsung mendukung dan mengurangi kondisi swadaya masyarakat (bottom up planning).

c. Program Dasar P2BPK

Program P2BPK meliputi :

1. Pengembangan Kelembagaan

Untuk membentuk atau meningkatkan organisasi yang sudah ada. Organisasi ini mengelola kegiatan-kegiatan warga yang berkaitan dengan pembangunan atau usaha ekonomis produktif khususnya dalam pengelolaan dana masukan dari luar atau dari warga masyarakat sendiri ,kegiatan yang dilakukan antara lain pengumpulan dana sertifikasi pengorganisasian dana kredit TRIGUNA, apabila telah cair keanggotaan serta sistem pembayaran anggota tentang cicilan kredit tersebut.

2. Penyediaan modal dan hubungan Bank/pemilik modal

Penyediaan modal di pergunakan untuk dua kebutuhan yaitu pembangunan ekonomis produktif melalui kredit Tri Guna (guna penggunaan lahan, guna pembangunan konstruksi rumah dan guna peningkatan pendapatan anggota) dari BTN

3. Penyediaan lahan permukiman tanah negara ini oleh Pemda Dati II Surakarta atas dasar sebagai berikut :

- Pemda Dati II Surakarta dalam mewujudkan fungsi tanah negara untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Kebutuhan Pemda Dati II Surakarta untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.
- Mensukseskan program pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi serta taraf hidup.

- Pemerataan sebaran permukiman dibagian utara kotamadya Dati II Surakarta yang pada saat ini masih mengacu ke selatan kota.
- Dukungan atas kesuksesan proyek Housing And Urban Renewal Development Action Plan And FED For Surakarta dalam rangka penataan atau peremajaan lingkungan di wilayah Mojosongo.

4. Rumah bedeng-bedeng sementara.

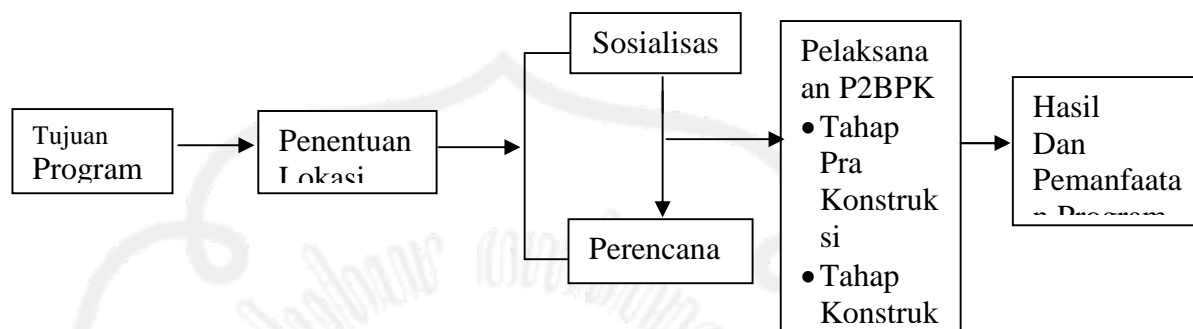
- Disediakan oleh Pemda Dati II Surakarta bagi masyarakat RT 03 RW I bantaran barat yang melakukan program redevelopment dengan harus memenuhi persyaratan teknis.
- Lokasi bedeng-bedeng di rencanakan di tanah negara RT 02 RW I bekas peternakan babi yang saat ini di gunakan untuk bedeng-bedeng 44 kk selama 6 bulan, selama lokasi RT 03 RW I di bangun sarana dan prasarananya.
- Bahan-bahan bedeng yang ada nantinya setelah tidak di gunakan dapat di pakai untuk mendukung komponen pengisi rumah mereka.

5. Pelatihan

- Dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan warga masyarakat khususnya untuk penyediaan material bangunan untuk pembangunan konstruksi rumah dan sebagai salah satu kegiatan dalam menciptakan pekerjaan baru bagi warga setempat.
- Pelatihan pengelolaan kelembagaan setempat misalnya pelatihan management keuangan P2BPK, kelompok bisnis yang ada.
- Pelatihan pembuatan paving block untuk pembangunan jalan lingkungan yang masih belum baik dan yang akan di rencanakan pada ke dua lokasi tersebut.
- Pelatihan pembuatan lock brick (bata berkait) yang merupakan teknologi tetap guna yang masih baru bagi penyediaan material murah bagi pembangunan dan pemugaran rumah.

B. Kerangka Berpikir

Keterbatasan dan tingginya harga lahan perkotaan di Surakarta telah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Mardalis (1990: 26) menerangkan bahwa “Penelitian deskripsi tidak untuk menguji hipotesis atau menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai variabel-variabel yang diteliti”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mojosongo Berseri I RT 03 RW I dan di Mojosongo Berseri II RT 03 RW VII Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres kota Surakarta, lokasi ini termasuk wilayah kumuh yang letaknya di pinggir

sungai dan selalu terancam banyak banjir. Lokasi ini dihuni oleh penduduk yang mayoritas berpenghasilan rendah, dalam memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan terdapatnya data-data yang bisa digali berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan setelah pengajuan proposal penelitian disetujui dosen pembimbing skripsi dan telah mendapat ijin-ijin dari pihak yang berwenang.

Jadual Penyusunan Skripsi

Jadual Penyusunan skripsi	Bulan/Tahun
1. Pengajuan Judul	
2. Pengajuan Proposal	
3. Perijinan	
4. Pengumpulan Data	
5. Penyusunan Laporan	

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun gejala yang terjadi karena hal ini merupakan variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan menunjang bagi keberhasilan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan data dari BAPPEDA di daerah Mojosongo terdapat permukiman kumuh sebanyak 5 RW dan 6 RT. Pada penelitian ini mengambil populasi di Mojosongo Berseri I RT 03 RW I dan Mojosongo Berseri II RT 02 RW VII Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebanyak 88 KK

2. Sampel

Untuk memudahkan pengambilan sampel secara purposive diambil responden sebesar 50% dari jumlah populasi yang ada yaitu untuk Mojosongo

Berseri I sebanyak 26 KK dan untuk Mojosongo Berseri II sebanyak 18 KK sehingga didapatkan sampel sebanyak 48 KK.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah suatu bentuk khusus atau proses yang umum dalam pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi maksudnya adalah memilih informan atau orang yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data dimana penelitian itu dilakukan secara selektif.

E. Variabel

Penanganan permukiman kumuh berdasarkan pola pembangunan bertumpu pada kelompok (P2BPK).

1. Indikator Permukiman Kumuh

Adapun yang dijadikan indikator tersebut dalam permukiman kumuh yaitu :

- a) **Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan**

Yang dimaksud tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu :

- 1) Tidak adanya saluran air /selokan
- 2) Jaringan listrik yang kurang memadai
- 3) Kurangnya penyediaan air bersih
- 4) Bangunan yang tidak layak huni

Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan :

- 1) Tidak adanya MCK
- 2) Tidak adanya ventilasi
- 3) Kurangnya sarana kesehatan (Puskesmas, RS, Tenaga Medis)

b) Kondisi bangunan yang sangat buruk

Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Dindingnya yan terbuat dari kayu bekas
- 2) Lantainya yang masih berupa tanah

c) Penghuninya Migran Tetap dan Tidak Tetap

Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan kartu tanda penduduk para penghuninya.

d) Warganya Berpenghasilan Rendah

Penghasilan rendah dari warganya dilihat dari pendapatan perkapitanya, tingkat pemenuhan kebutuhan .

2. Indikator dalam P2BPK

Yaitu dilihat dari keinginan warga yang ingin merubah lingkungan permukiman yaitu berupa :

- a) Usulan masyarakat unrtuk perbaikan lingkungan permukiman
- b) Diadakannya rembug bersama untuk memperoleh titik temu sebagai niat bersama
- c) Terlibat dalam perencanaan dengan pengusulan program-program perbaikan kawasan masing-masing.

- d) Terlibat dalam pembentukan dari keanggotaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Moleong (1990: 35) mengemukakan sebagai berikut : “ Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan ini”. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dan mendalam dari informan, sehingga data yang diperoleh dengan teknik lebih mendalam dan dapat dipercaya. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan masyarakat Mojosoongo Berseri I dan masyarakat Mojosoongo Berseri II, mengenai kondisi lingkungan permukiman, kondisi bangunan perumahan, status kependudukan, dan pendapatan warga. Pada penelitian ini peneliti dibantu oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Ketua RT, Ketua RW setempat, Kepala Kelurahan Mojosoongo, dan masyarakat Mojosoongo Berseri I dan masyarakat Mojosoongo Berseri II.

2. Observasi

Peneliti mengamati situasi tentang berbagai hal selama kunjungan di lapangan, dengan mencatat apa yang dilihat, diperhatikan dan diamati oleh penulis pada waktu dilapangan. Adapun observasi yang dilakukan yaitu tentang kondisi lingkungan permukiman dan kondisi bangunan perumahan penduduk

Validitas Data

Penelitian ini tidak menggunakan validitas data karena data-data yang didapat sudah dianggap valid. Kevalidan data berasal dari sumber yang bersangkutan

Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder harus dianalisis agar dapat dibaca dengan mudah dan memberikan informasi yang diperlukan. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif maka untuk mengambil data yang telah terkumpul digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan tabel. Dari berbagai data kemudian diolah, ditafsirkan, dan diinterpretasikan untuk menjawab perumusan masalah kemudian diambil kesimpulan atas dasar analisis kualitatif. Jadi bentuk analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan dibantu dengan tabel data langsung ditafsirkan dan diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan atas dasar analisis kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Umum Lokasi

1. Keadaan Fisik

a. Letak, Luas dan Batas

Berdasarkan letak astronomis Kelurahan Mojosoongo terletak di . Kelurahan Mojosoongo berada di Kecamatan Jebres kira-kira 3,0 Km dari Kota Surakarta dan termasuk dalam wilayah kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Mojosoongo merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Jebres. Menurut data monografi Kelurahan Mojosoongo tahun 2000, bahwa luas wilayah Kelurahan Mojosoongo adalah 532.927 Ha yang terbagi atas tanahnya yaitu :

- 1) Tanah sawah tadah hujan seluas 19.042 Ha
- 2) Tanah tegalan/kebunan seluas 119.970 Ha

- 3) Tanah pekarangan/bangunan seluas 359.905 Ha
- 4) Tanah lain-lain/sungai/jalan/kuburan dan lain-lain seluas 34.065 Ha

Luas wilayah Kelurahan Mojosongo terbagi menjadi 27 Duku, 31 RW dan 145 RT. Dilihat dari batas administrasi Kelurahan Mojosongo berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan kota Karanganyar
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panggung Rejo/Kelurahan Jebres
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Jebres/Kota Karanganyar
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kadipiro/Kelurahan Nusukan

1. Keadaan Penduduk

Dengan mengetahui keadaan penduduk disuatu daerah akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi didaerah tersebut. Tentang keadaan penduduk di Kelurahan Mojosongo dengan berbagai rinciannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Jumlah dan kepadatan

Jumlah penduduk di Kelurahan Mojosongo sampai dengan bulan Agustus 2002 adalah 40.056 jiwa yang terdiri dari 19.846 jiwa penduduk laki-laki, dan 20.210 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangga adalah 10.726 Kepala Keluarga, sehingga jumlah rata-rata 4 orang. Luas wilayah Kelurahan Mojosongo adalah 532.927 Ha. Berdasarkan jumlah penduduk wilayah Kelurahan Mojosongo sebesar 40.056 jiwa, maka kepadatan penduduk Kelurahan Mojosongo adalah 7.516 jiwa/Km.

Menurut Karmono dalam Sri Prihatin (1995 : 43), tingkat kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan menjadi 6 yaitu :

1. Sangat tinggi sekali, jika kepadatan penduduk melebihi 3000 jiwa/Km
2. Tinggi sekali, jika kepadatan penduduk mencapai 20001 sampai 3000 jiwa/Km
3. Tinggi, jika kepadatan penduduk mencapai 1001 sampai 2000 jiwa/Km
4. Sedang, jika kepadatan penduduk mencapai 501 sampai 1000 jiwa/Km
5. Rendah, jika kepadatan penduduk mencapai 101 sampai 500 jiwa/Km

6. Sangat rendah, jika kepadatan penduduk mencapai kurang dari 100 jiwa/Km Berdasarkan penggolongan kepadatan penduduk tersebut maka Kelurahan Mojosoongo termasuk pada klasifikasi sangat tinggi sekali, karena memiliki kepadatan penduduk sebesar 7516 jiwa/Km.

b. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk pada hakekatnya adalah pengelompokan penduduk yang disusun berdasarkan ciri-ciri/karakteristik yang sama (Sri Prihatin : 43). Dengan membagi-bagi penduduk atas kelompok-kelompok tertentu menurut karakteristik yang sama akan dapat diambil suatu kesimpulan yang bermanfaat untuk pemecahan masalah-masalah kependudukan. Pengelompokan penduduk dapat dibagi berdasarkan atas :

1) Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat menjadi petunjuk bagi kemungkinan bertambah atau berkurangnya perkembangan penduduk dimasa mendatang, kemungkinan bertambah atau berkurangnya memberi gambaran pula adanya penduduk dalam penduduk dalam usia produktif dan non produktif.

Menurut Bintarto dalam Sri Prihatin (1995: 43) mengklasifikasikan usia penduduk menjadi tiga golongan usia yaitu golongan usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-65 tahun), dan usia non produktif (65 tahun keatas). Berdasarkan penggolongan tersebut, penduduk Kelurahan Mojosoongo mempunyai struktur usia muda dan sebagian besar termasuk usia produktif. Data menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 15-65 tahun mencapai 53,24%, sedangkan sisanya termasuk usia kurang dari 15 tahun sebesar 40,28% dan penduduk usia 65 keatas hanya 6,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

Tabel 1: Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kelurahan Mojosoongo tahun 2002

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat diketahui besarnya angka ketergantungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa beban tanggungan penduduk Kelurahan Mojosongo sebesar 88 berarti setiap 100 orang dalam usia produktif menanggung beban sebanyak 88 orang.

Menurut Slamet Riyadi dalam Sri Prihatin (1995: 44) beban tanggungan dibagi menjadi tiga golongan yaitu beban tanggungan rendah (kurang dari 60%), beban tanggungan sedang (60%-90%), beban tanggungan berat (lebih dari 90%).

Berdasarkan kriteria ini maka beban tanggungan penduduk Kelurahan Mojosongo adalah sedang.

2) Komposisi penduduk menurut pendidikan

Menurut kriteria Direktorat Jendral Pembangunan Desa Dalam Negeri (1997) mengenai pokok-pokok tentang pertumbuhan desa di Indonesia, maka tingkat pendidikan digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu :

Rendah : jumlah penduduk yang tamat SD kurang dari 30%

Sedang: jumlah penduduk yang tamat SD antara 30-60%

Tinggi: jumlah penduduk yang tamat SD lebih dari 60%

Untuk mengetahui keadaan penduduk di Kelurahan Mojosongo dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Mojosongo adalah tamat SD 14,14%, tamat SLTP 17,16%, tamat SLTA 14,08%, sedangkan presentase terkecil terdapat pada tamatan Perguruan Tinggi yaitu 7,4%

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kelurahan Mojosongo Tahun 2002.

Berdasarkan kriteria diatas, maka tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Mojosongo adalah tinggi karena penduduk yang tamat SD keatas sebesar 72,58%.

3) Komposisi Penduduk menurut mata pencaharian

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian sangat berguna untuk memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada berbagai lapangan pekerjaan dan dapat memberikan gambaran tentang struktur ekonomi suatu daerah. Adapun komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Mojosongo Tahun 2002

A. Penanganan Permukiman kumuh dengan pola P2BPK

1. Pelaksanaan

Merosotnya kualitas lingkungan hidup diperkotaan sebagai akibat meluasnya permukiman kumuh, tentulah bukanlah hal yang dikehendaki semua pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah telah mencanangkan program perumahan kota. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya serta peningkatan kualitas rumah dan lingkungan masyarakat di daerah-daerah kumuh diperkotaan.

Dasar pelaksanaan program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) adalah dasar pembangunan yang bertumpu pada masyarakat setempat yang berarti bertumpu pada kesiapan, kemampuan, dan kemauan warga sendiri, tetapi didalam batasan perencanaan makro pemerintah serta pendamping teknis oleh konsultan pendamping yang telah ada.

Kegiatan ini termasuk suatu usaha untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Selain itu secara tidak langsung mendukung dan mengurangi kondisi lingkungan kumuh diperkotaan dengan memanfaatkan kekuatan swadaya masyarakat (bottom up planing) yang pada sekarang ini sedang dipacu.

Secara umum dasar pertimbangan pengembangan kawasan perencanaan adalah penyediaan ruang terbuka yang nyaman untuk dinikmati publik dengan fasilitas-fasilitas yang saling menunjang. Adapun pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Kebijakan pembangunan tata ruang dan sektoral Kotamadya Dati II Surakarta, serta memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas.
- b. Strategi pengembangan tata ruang kota dan sektoral berdasarkan studi maupun program yang telah disusun sebelumnya.
- c. Potensi dan masalah yang dimiliki Kotamadya Dati II Surakarta pada umumnya dan kawasan perencanaan pada khususnya
- d. Kekuatan ekonomi yang ada dan yang dominan, yaitu perdagangan dan jasa serta kegiatan pendukungnya.

- e. Pengoptimalan sarana dan prasarana kota untuk mendukung kepentingan umum.

Sedangkan pertimbangan khusus dalam pengembangan kawasan adalah

1. Letak strategis kelurahan mojosongo yang berdekatan dengan kegiatan jalur transportasi utama yaitu terminal bus induk Tirtonadi dan terminal transit barang Pedaringan, kawasan wisata Goa Maria dan kawasan pendidikan yaitu kampus UNS dan PTS lainnya.
2. Merupakan wilayah pengembangan permukiman dan fasilitas umum kota di wilayah utaraKotamadya Dati II Surakarta.
3. Adanya fasilitas perdagangan yaitu pasar Mojosoongo dan beberapa industri besar dan kecil.

Pengembangan perumahan di lakukan dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu

1. Perencanaan type rumah, di arahkan agar menghindari terjadinya ‘segresi sosial’ sehingga variasi type rumah yang akan di kembangkan harus dapat di kombinasikan untuk setiap penyediaan rumah.
2. Perencanaan penyebaran dan lokasi pengembangan disesuaikan dengan hierarki pola infrastruktur sehingga distribusi lahan dan kegiatan terkait dari skala lingkungan ke arah skala kawasan kota dapat terpenuhi.
3. Transformasi permukiman dari horizontal ke arah vertikal di arahkan pada suatu bentuk pemecahan yang mendasar terhadap masalah pengembangan hunian pada kawasan perencanaan walaupun masih dalam taraf dua lantai.

Program P2BPK di pilih oleh Pemerintah Daerah Surakarta untuk memecahkan masalah permukiman kumuh. Program penataan kawasan di Kelurahan Mojosoongo telah dimulai sejak tahun anggaran 1997/1998 dengan pendekatan partisipasi penuh dari masyarakat, melalui proyek Housing Urban Renewal Development Action Plan And Final Engineering Design of Surakarta dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan permukiman, dapat meningkatkan peran serta aktif masyarakat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman dengan kualitas kehidupan dan penghidupan serta kemandirian yang meningkat. Konsep yang digunakan pada kelompok Mojosoongo Berseri I dan Kelompok Mojosoongo Berseri II berbeda yaitu untuk Kelompok Mojosoongo Berseri I menggunakan konsep Redevelopment artinya lokasi permukiman yang sudah ada dibongkar untuk kemudian dibangun kembali permukiman yang lebih tertata. Sedangkan untuk Kelompok Mojosoongo Berseri II menggunakan konsep Resettlement yang artinya lokasi permukiman penduduk yang kondisi lingkungannya sudah tidak layak huni dipindahkan ke lokasi yang baru.

Sebagai uji coba pertama (PYLOT PROYEK) pembangunan perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) dipilih sebagai salah satu permukiman kumuh yang berlokasi di Bantaran Kali Anyar yaitu RT 03 RW I Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres yang status tanahnya adalah tanah negara. Bantaran Kali Anyar tersebut dihuni oleh 61 KK yang mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah/ ekonomi lemah. Lokasi ini adalah termasuk wilayah kumuh yang diprioritaskan untuk dilaksanakan peremajaan lingkungan permukiman kumuh, karena letaknya dipinggir sungai yang membelah kota yang berada pada pintu gerbang masuk kota Surakarta dari arah utara, sehingga memberi pandangan yang kurang baik, dan dimusim hujan penduduk selalu terancam oleh bahaya banjir.

Sama halnya dengan proyek penataan lingkungan kumuh perkotaan masyarakat Mojosoongo Berseri II, pada Kelompok Mojosoongo Berseri II juga diadakan penataan lingkungan kumuh sebanyak 37 KK yang terdiri dari :

-27 KK, menempati lokasi awal Bantaran Timur Kali Anyar RT 01 dan RT 02 RW 02

-10 KK, menempati lahan kuburan milik Kraton Mangkunegaran RT04 RW 01

Konsep yang digunakan pada kelompok Mojosoongo Berseri II ini adalah konsep Resettlement, maka masyarakat yang berasal dari Bantaran Timur Kali Anyar akan dipindahkan ke lokasi pemindahan yaitu di Bulu Rejo RT 03 RW VII

yang awalnya meruoakan tanah negara bebas, namun ditempati oleh 7KK, kuburan Cina, dan tanaman, namun Dinas dan instansi BAPPEDA,DTK, BPN, dan Dinas perumahan Kotamadya Dati II Surakarta atas persetujuan Bapak Walikotamadya Dati II Surakarta ditentukan sebagai lokasipemindahan permukiman ke37 KK, sedangkan 7KK eksisting diberi prioritas menghuni dengan mengikuti syarat-syarat penataanlingkungan yang telah ditentukan.

Pembangunan perumahan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan WalikotamadyaKDH Tingkat II Surakarta no. 660.1/009/1/1997 tanggal 16 Januari 1997 tentang penunjukan lokasi wilayah Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta sebagai proyek penataan lingkungan permukiman perkotaan Surakarta dan surat edaran Pemda Kotamadya Dati II Surakarta NO.050/262-vii/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang prinsip-prinsip dasar peremajaan lingkungan permukiman perkotaan Kelurahan Mojosongo Kotamadya Surakarta, selain itu juga mendapat dukungan dari Penda Kotamadya Dati II Surakarta mengenai penyediaan tanah untuk kegiatan pemindahan lokasi permukiman masyarakat dengan tetap mengacu pada legalitas.

Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Masyarakat (P2BPK) ini melalui tiga tahapan yaitu :

1. Tahap Pra Konstruksi

Untuk memulai proyek dan mewujudkan citc-citc penduduk dalam berpenghidupan, maka perlu dipadukan dalam suatu rembug bersama baik secara formal maupun non formal untuk memperoleh titik temu sebagai niatbersama. Dengan menggunakan mediator LSM dilaksanakan rembug warga yang terbentuk dalam suatu kelompok swadaya masyarakat yang membuat kesepakatan tentang rencana pembangunan perumahan mereka nantinya antara lain tentang cara pelaksanaan, dana, dan syarat-syarat pembangunan perumahan tersebut. Adapun dari titik temu niat bersama membuahkan hasil sebagai berikut :

a. Pemerintah

- Menata lingkungan

Kondisi lingkungan di Bantaran Kali Anyar sudah sangat memprihatinkan dan perlu ditata, adanya air sungai yang tidak sehat lagi,

menimbunnya sampah disungai, ditambah lagi limbah dari industri tahu tempe dan peternakan babi. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kebijaksanaan untuk menata lingkungan permukiman mereka.

-Membangun sarana dan prasarana

Penataan permukiman ini di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat, adapun sarana yang dibangun yaitu mushola, gedung sekretariat, Cressen Pujasera, kios dan prasarana yang disediakan yaitu pematangan tanah, pondasi/talud, jslsn paving, saluran sanitasi dan air bersih.

-Membuat bedeng-bedeng sementara selama kawasan dibangun

Dengan diterapkannya konsep redevelopment yang berarti masyarakat harus meninggalkan rumahnya yang dulu untuk pindah atautinggal sementara, maka pemerintah membuat kebijaksanaan yaitu mendirikan bedeng-bedeng sementara yang dilakukan oleh masyarakat secara bergotong royong

Memberikan hak sertifikat tanah, hak milik atas tanah yang ditempati Permohonan PEDDA Surakarta yang kemudian mengeluarkan surat edaran Ketua BAPPmasyarakat untuk mengajukan sertifikasi tanah ke BPN ditindak lanjuti oleh BAPPEDA no. 050/ 262- VII /97 yang berisi bahwa pada prinsipnya Pemda Surakarta menyetujui permohonan warga tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu sanggup menata lingkungannya sendiri secara swadaya, sanggup berpartisipasi aktif dalam penataan lingkungan, sanggup menerima segala sesuatu akibat dalam penataan lingkungan, sanggup membayar dana partisipasi pembangunan, dan sertifikasi sebagai syarat dalam pengalihan hak atas tanah negara, sanggup menyelesaikan permasalahan dilingkungannya sendiri.

b. Warga

- Membongkar rumah

Pembongkaran rumah kumuh ini dilaksanakan dan didanai oleh masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mulai sadar bahwa

lingkungan tempat mereka tinggal perlu untuk segera diperbaiki karena sudah tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan .

-Memenuhi semua persyaratan administrasi

Dalam penataan lingkungan ini masyarakat bersedia memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, seperti syarat-syarat pengajuan kredit ke BTN, sertifikasi hak milik, dan lain-lain . Misalnya syarat dalam pengajuan untuk mendapatkan rumah harus menunjukkan kartukeluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan surat keterangan dari RT setempat. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, mereka bersedia untuk mengikuti nikah masal yang diadakan agar mereka memiliki status pernikahan yang jelas, dan memenuhi persyaratan administrasi yaitu bersedia membayar dana partisipasi pembangunan yang dibayar setiap bulan, warga hanya membayar biaya sertifikasi hak milik yang besarnya untuk paguyuban Mojosoong Berseri I sebesar Rp 464.160,- dan untuk paguyuban Mojosoong Berseri II sebesar Rp 561.775,-.

- Menempati bedeng-bedeng sementara

Awal kegiatan penataan lingkungan permukiman ini terlihat adanya sikap pasif masyarakat namun ini hanya terjadi pada saat awal sosialisasi, tetapi setelah dilakukan dialog-dialog dan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat akhirnya masyarakat mau menerima rencana penataan lingkungan ini , sehingga masyarakat aktif dalam mengikuti kegiatan ini, wujud dari kesadaran mereka yaitu mereka bersedia meninggalkan rumah mereka dan menempati bedeng-bedeng sementara

- Melakukan undian tempat

Untuk penentuan kapling rumah, melalui sistem undian atau lotre yakni pertama dilakukan pemilihan nomer panggilan yang dipersiapkan. Peserta undian kapling mengambil nomer panggilan yang dipersiapkan oleh tim pendamping secara acak. Pemilihan kapling dilakukan berdasarkan nomer panggilan, peserta undian yang mendapatkan nomer panggilan kecil diberi kesempatan untuk memilih kapling lebih dulu.

- Membangun rumah baru

Pembangunan perumahan ini pembiayaan berasal dari kredit TRIGUNA Bank BTN Cabang Surakarta dimana dana tersebut digunakan untuk penyediaan lahan dan warga hanya membayar harga perunit ini merupakan dana kredit TRIGUNA dari BTN yang dikeluarkan oleh BTN dalam rangka membantu warga dalam pengadaan perumahan. Kalau dilihat dari harganya yang relatif murah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kredit TRIGUNA ini memang benar-benar dimaksudkan untuk membantu warga khususnya yang tingkat ekonominya menengah kebawah. Sebagai konsekuensi diadakannya penataan lingkungan yang lebih manusiawi ini, maka warga setiap bulan harus mengangsur kredit perumahan tersebut untuk Kelompok Mojosoongo Berseri I sebesar Rp 5.545.200,- dan Kelompok Mojosoongo Berseri II sebesar Rp

2. Tahap Konstruksi

a. Mojosoongo Berseri I

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa konsep yang digunakan adalah konsep Redevelopment. Dengan adanya hal tersebut maka penduduk harus meninggalkan rumahnya yang lama untuk pindah atau tinggal sementara dirumah-rumah bedeng sementara yang telah disediakan sebelumnya. Pembangunan bedeng-bedeng sementara ini dilakukan oleh masyarakat sendiri secara bersama-sama. Setelah bedeng-bedeng sementara tersebut jadi, kemudian warga pindah kerumah bedeng tersenut. Dengan adanya keinginan masyarakat untuk mensertifikatkan tanah yang mereka tempati dari tanah negara menjadi hak milik, menurut hasil pendataan yang telah dilakukan terdapat 51KK yang mengajukan permohonan sertifikasi hak milik. Maka dibangun perumahan sejumlah 51 unit dan kios 10 unit. Pada saat pendataan awal, masyarakat harus melengkapi syarat-syarat seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan dari RT setempat, serta surat nikah.

Pembangunan perumahan ini memiliki tipe 35/35 sebanyak 51 unit dimana pembayarannya bersumber dari kredit KPR-RSS Bank BTN. Waktu yang dibutuhkan pada pembangunan perumahan ini hampir memakan waktu satu tahun dan untuk penempatan kembali warga yang telah tinggal dibedeng-bedeng sementara dilakukan undian atau sistem lotre.

Masyarakat merasakan bahwa penataan lingkungan perumahan ini merupakan kepentingan mereka juga bukan kepentingan Pemda saja. Hal ini juga merupakan salah satu usaha dalam pemberdayaan dan membentuk kemitraan dengan masyarakat serta menanamkan pemikiran persamaan nasib dan kebutuhan akan perumahan secara bersama. Paguyuban Mojosongo Berseri I RT 01RW1, menginginkan rumah yang bersih dan legal. Pembangunan perumahan sebanyak 51 unit tipe 35/35 yang mendapat bantuan kredit KPR-RSS BTN, harga perunit Rp.6.210.000,- termasuk sertifikat hak milik, ijin lokasi, dan konstruksi rumah. Pembangunan 10 kios rakyat tipe 15/15 mendapat kredit dari dana Revolving Fund Bank Dunia, dengan harga perunit Rp. 3.900.000,-. Harga perunit rumah tipe 35/35 ini, setiap KK dikenai biaya sebesar Rp. 5.545.220,- dengan angsuran Rp.69.000,-/ bulan selama 15 tahun. Pada kegiatan pembangunan perumahan ini partisipasi masyarakat memang sangat berperan, mulai dari tahap pra konstruksi sampai dengan tahap konstruksi. Pembangunan perumahan Mojosongo Berseri I ini diresmikan pada tanggal 9 September 1999. Penempatan kembali masyarakat dari rumah bedeng sementara kerumah yang baru, timbul konflik karena warga yang dulu tanahnya lebih luas dan tempatnya dekat dengan jalan raya, sekarang luasnya sama dengan yang lain dan mendapat kapling dibelakang.

c. Mojosongo Berseri II

Pada tahap konstruksi ini tercatat 42 warga pemohon sertifikasi yakni 25 orang dari RT1 RWII, 10 orang dari RT03 RW I, dan 7 orang dari RT 03 RW VII. Pembangunan rumah di daerah ini mempunyai tipe 21/53 sebanyak 37 unit. Setelah warga mengajukan permohonan sertifikasi tanah ke BPN, kemudian mengajukan surat ijin mendirikan bangunan (IMB), hal ini dilakukan guna mendapatkan kredit TRIGUNA. Pelaksanaan pembangunan perumahan ini melibatkan dan memberdayakan masyarakat mulai dari pematangan lahan sampai pembangunan rumah. Pembiayaan pembangunan perumahan ini berasal dari kredit TRIGUNA Bank BTN Cabang Surakarta sebesar Rp. 163.170.000,- untuk penyediaan lahan dan administrasi pembangunan rumah serta untuk pembangunan fisik rumah perunit. Adapun harga rumah perunit sebesar Rp. 4.410.000,- dengan jangka waktu pengangsuran selama 15 tahun, dan warga diwajibkan membayar

angsuran rumah sebesar Rp. 49.000,-/ bulan. Adapun pekapitulasi pembiayaan perorangan Paguyuban Mojosoongo Berseri II RT03 RW VII dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rekapitulasi Pembiayaan Perorang Paguyuban P2BPK Mojosoongo Berseri II RT
03 RW VII

No	Kegiatan	Biaya
1	Biaya kegiatan sertifikasi hak milik	182.275
	a. Biaya sertifikasi	
	b. biaya ijin lokasi	
	c. Biaya patok batas lahan	
2	Biaya dana partisipasi	337.500
3	Biaya kegiatan ijn mendirikan bangunan (IMB)	42.000
4	Biaya kegiatan pra realisasi kredit TRIGUNA	
	a. Provisi Bank	22.050
	b. Angsuran I	49.000
	c. Notaris	50.000
	d. Asuransi kebakaran	37.610
	Jumlah total pengeluaran	720.435
	Kredit TRIGUNA BTN	4.410.000
	Dana membangun rumah 21/54	3.689.565

Sumber :

- a. Tabel biaya sertifikasi BTN Kotamadya Surakarta tanggal 15 Februari 1999
- b. Tabel biaya kredit TRIGUNA BTN Cabang Surakarta tanggal 25 Maret 1999

Pada tahap konstruksi ini melibatkan aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah yakni Dinas Perumahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program P2BPK, swasta yaitu Tim Pendamping (PT. Wastuwidyawan), dan masyarakat (Paguyuban Mojosoongo Berseri I dan Paguyuban Mojosoongo Berseri II). Selain itu ada pihak-pihak lain yang berperan

yaitu BPN dalam hal pemanfaatan kredit TRIGUNA, dan Kontraktor pembangunan perumahan yaitu CV. Kusuma Wijaya dan UD. Wono luhur. Sesuai dengan konsep dasar pembangunan yakni menempatkan pembangunan bertumpu pada masyarakat yang berarti bertumpu pada kesiapan, kemauan, dan kemampuan masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat memangsangat penting dalam pelaksanaan program P2BPK.

Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai “obyek” kebijaksanaan pemerintah namun sebaliknya, dalam hal ini “mitra pembangunan”, dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan/ penyusunan program sampai pada pelaksanaan dan operasional serta pemeliharaan. Partisipasi masyarakat terlihat dalam kemauan warga Mojosoongo Berseri I DAN Mojosoongo Berseri II untuk memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan kemauan mereka mematuhi kesepakatan yaitu masyarakat mau dipindahkan kebedeng-bedeng sementara yang terletak diwilayah RT02RW1 , selama rumah mereka dibangun, dan untuk warga Bantaran Timur bersedia untuk meninggalkan lokasi tempat tinggal yang lama dan berpindah kelokasi yang baru yakni RT03 RW VII Kedung Tungkul.

3. Tahap Pasca Konstruksi

Pada tahap pasca konstruksi ini, diperumahan Mojosoongo Berseri I setelah selesai pembangunan perumahan ini beserta sarana dan prasarana yang telah diusulkan oleh masyarakat, maka kegiatan selanjutnya yaitu penempatan kembali serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun. Adanya penataan lingkungan ini mempunyai dampak yang dirasakan oleh warga yaitu warga yang dulu mempunyai rumah permanen yang tempatnya strategis setelah diadakannya penataan lingkungan, luas tanah menjadi lebih kecil dengan type 35/35 dan lokasinya berada dibelakang. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesadaran dari warga yang tidak memikirkan orang lain yang lingkungannya kumuh dan tidak sehat serta tidak layak huni.

Sementara itu untuk Mojosoongo Berseri II, pasca konstruksi pembangunan rumah type 21/54 sebanyak 37 unit yang bekerjasama dengan UD. Wono Luhur. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu pemindahan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Pada tahap pasca konstruksi ini tenaga penyuluh masyarakat

mengadakan acara pembekalan yang bertempat di aula kantor Kelurahan Mojosoongo, pembekalan ini diikuti oleh masyarakat Mojosoongo Berseri I dan Mojosoongo Berseri II. Adapun acara pembekalan ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah ada, selain itu diadakan pengevaluasian hasil pembangunan dengan maksud untuk dapat mengetahui apakah hasil pembangunan itu sudah sesuai keinginan masyarakat atau tidak. Setelah bangunan perumahan ini selesai Pemerintah Daerah mencoba menggali potensi pada masyarakat dalam kontribusi operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun. Pada tahap pemeliharaan ini masyarakat cukup antusias dalam upaya pemeliharaan hasil-hasil yang telah di capai. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dapat diketahui dari keaktifan warga dalam kegiatan pembersihan lingkungan yang dilakukan rutin baik individu maupun bersama-sama masyarakat lain. Namun tidak semua warga memperlihatkan sikap positif tersebut, masih ada warga yang kurang bisa memanfaatkan hasil penataan lingkungan ini dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akan lingkungan yang bersih dan sehat. Penataan lingkungan dengan program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok ini dapat di katakan sebagian besar warga mendukung program ini. Disamping itu peran dan kemauan serta kesungguhan dari KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang telah terbentuk, untuk mengubah lingkungan permukiman mereka menjadi permukiman yang layak huni.

2. Kondisi Permukiman Kumuh

a. Kondisi Permukiman Sebelum Penataan Lingkungan

Masyarakat membangun secara liar rumah-rumah yang berada diatas tanah negara (secara ilegal), sehingga menimbulkan adanya permukiman yang liar serta kumuh Hal ini dikarenakan masyarakat membangun rumah dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas tanpa mempertimbangkan aspek kualitas, aspek kesehatan serta aspek legalitas. Untuk masalah legalitas tanah yang mereka tempati pada saat sebelum penataan lingkungan ini masyarakat belum mempunyai sertifikat hak milik, hal ini dapat dilihat dari tabel.

Masyarakat yang ada dikawasan ini kurang mengetahui pentingnya MCK untuk kehidupan mereka. Banyak di antara mereka membuat kotoran disungai dan melakukan kegiatan mencuci serta mandi menggunakan air yang sudah tercemari baik dari sampah, limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kondisi dikawasan ini sarat akan polusi baik polusi dari limbah babi maupun polusi dari limbah industri tahu dan tempe. Bau dari limbah tersebut sangat mengganggu pernafasan dan masyarakat tidak bisa menghirup udara segar. Pendirian rumah yang apa adanya dan dengan pengetahuan serta kemampuan masyarakat sendiri mengakibatkan rumah-rumah yang ada tidak layak huni karena bahan-bahan untuk mendirikan rumah menggunakan bahan seadanya. Seperti dinding rumah, yang ada pada kawasan ini menggunakan kayu bekas atau gedek yang apabila ada angin kencang rumah tersebut bisa roboh dan juga atap yang mereka gunakan bahannya juga dari gedek. Permukiman di Bantaran Kali Anyar ini berada dikawasan yang rawan banjir dimana belum adanya pengerasan dinding sungai/talud disekitar permukiman. Dengan adanya hal tersebut diatas jelaslah bahwa rumah yang mereka tempati tidak layak huni dan membahayakan jiwa penduduk. Masih rendahnya pengertian dan pengetahuan warga terhadap peraturan-peraturan dalam mendukung suatu lingkungan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari warga untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan legal. Dengan adanya hal tersebut diatas jelaslah bahwa rumah yang mereka tempati tidak layak huni dan membahayakan jiwa penduduk. Hal itu dapat dilihat pada gambar berikut

b. Kondisi Permukiman Kumuh Sesudah Penatan Lingkungan

Dengan adanya penataan lingkungan oleh pemerintah daerah dimana masyarakat bersedia mengikuti kegiatan tersebut dan masyarakat bersedia memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat tanah dari rumah yang mereka tempati, maka pemerintah memberikan sertifikat hak milik yang sudah jelas status tanah yang mereka tempati, dengan demikian masyarakat dapat menikmati hasil dari penataan lingkungan ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

a. Ketersediaan saluran air/selokan

Tabel 7 : Kepemilikan saluran air/selokan

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Memiliki saluran air/selokan	26	100	17	99
2.	Tidak memiliki saluran air/selokan	-	-	1	1
	Total	26	100	18	100

Saluran air/selokan berfungsi untuk membuang limbah rumah tangga, kesadaran masyarakat akan perlunya saluran air tersebut dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan bahwa 99% warga sudah memiliki saluran air/selokan walaupun ada 1% warga yang tidak mempunyai saluran air/selokan

b. Jaringan Listrik

Tabel 8 : Kondisi Fasilitas Penerangan

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Telah memenuhi kebutuhan masyarakat	26	100	18	100
2.	Belum memenuhi kebutuhan masyarakat	-	-	-	-
	Total	26	100	18	100

Masalah penerangan adalah masalah yang sangat vital dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan bersangkutan dengan aktifitas sehari-hari, baik untuk belajar, untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Oleh sebab itu pada pembangunan perumahan ini pemerintah memberikan fasilitas listrik, hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan masyarakat. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa listrik yang disediakan oleh pemerintah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini bisa dilihat dari 100%

c. Pengadaan Air Bersih

Tabel: Kondisi Air Bersih

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sumur sendiri	6	23	6	11
2.	Sumur bersama	-	-	12	-
3.	Sumur tetangga	-	-	-	-
4.	PDAM	20	77	-	89
	Total	26	100	18	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 77% untuk masyarakat Mojosoongo Berseri I dan 89% masyarakat Mojosoongo Berseri II telah menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM guna mencukupi kebutuhan air bersih baik untuk minum, mencuci, maupun untuk kebutuhan lainnya. Walaupun masyarakat harus membayar sejumlah uang untuk setiap air yang mereka gunakan. Disamping itu ada juga masyarakat yang memilih menggunakan sumur sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dengan alasan air sumur lebih bersih dari pada air PDAM. Hal itu bisa dilihat dari tabel diatas untuk Mojosoongo Berseri I sebesar 23% dan untuk Mojosoongo Berseri II sebesar

2. Persyaratan Kesehatan

a. MCK (Mandi Cuci Kakus)

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Ada kamar mandi /WC tersendiri	26	100	18	100
2.	Tidak ada kamar mandi/WC	-	-	-	-
	Total	26	100	18	100

Salah satu ukuran kesehatan adalah pada ketersediaan MCK yang cukup. Konsisi perumahan yang dijumpai ternyata menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki MCK sendiri. Hal itu ditunjukkan dari data yang ada yaitu 100% responden menyatakan mereka telah mempunyai MCK sendiri. Itu menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari akan pentingnya MCK bagi kesehatan.

b. Ventilasi

Tabel: Kepemilikan Ventilasi

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Mempunyai ventilasi yang cukup	26	100	18	100
2.	Tidak mempunyai ventilasi yang cukup	-	-	-	-
	Total	26	100	18	100

Ventilasi untuk pergantian sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari sangat diperlukan untuk mendirikan sebuah rumah. Dari data diatas diperoleh data sebanyak 100% responden baik dari Mojosongo Berseri I dan Mojosongo Berseri II, ini berarti masyarakat telah menyadari akan pentingnya hidup sehat.

d. Sarana Kesehatan

Tabel: Ketersediaan Sarana Kesehatan

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Puskesmas	1	100	-	-
2.	Posyandu	-	-	1	100
	Total	1	100	1	100

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang karena dengan tubuh yang sehat dapat melakukan kegiatan apapun. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa untuk Mojosongo Berseri I mempunyai Puskesmas yang juga berperan sebagai Posyandu, sedangkan untuk Mojosongo Berseri II hanya memiliki Posyandu saja.

1. Kondisi Bangunan
 - a. Kondisi dinding rumah

Tabel: Kondisi Dinding Rumah Responden

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dari bambu	-	-	-	-
2.	Dari papan/triplek	-	-	-	-
3.	Dari setengah tembok	-	-	-	-
4.	Dari tembok	26	100	18	100
	Total	26	100	18	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dinding rumah mereka mayoritas tembok yaitu sebanyak 100% responden. Dari informasi masyarakat pada saat pembangunan perumahan ini dilaksanakan masyarakat diberi kebebasan untuk mengusulkan bentuk rumah mereka sendiri dengan membuat sketsa, sehingga mereka dapat menempati rumah seperti yang mereka inginkan.

b. Kondisi Lantai Rumah

Tabel: Kondisi Lantai Rumah Responden

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dari semen/plester	3	12	8	45
2.	Dari tegel/teraso	5	19	4	22
	Dari porselen/keramik	18	69	6	33
	Total	26	100	18	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi lantai rumah responden bervariasi untuk Mojosoongo Berseri I rumah yang lantainya dari semen sebesar 12%, dari tegel/teraso sebesar 19%, dan dari porselin/keramik sebesar 69%. Sedangkan untuk Mojosoongo Berseri II untuk rumah yang lantainya dari semen sebesar 45%, dari tegel/teraso sebanyak 22%, dan dari keramik/porselin sebanyak 33%.

c. Kondisi Perumahan

Tabel: Kondisi Perumahan Responden

Kondisi perumahan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah permanen, hal ini bisa dilihat dari data yang ada yaitu sebesar 100% responden baik dari Mojosoongo Berseri I maupun Mojosoongo Berseri II mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah yang permanen. Hal itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah dan swasta yang mengadakan penataan perumahan yang layak huni.

4. Status Penempatan Rumah

Tabel: Status Responden Dalam Hal Penempatan Rumah

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Penduduk asli	26	100	18	100
2.	Pendatang	-	-	-	-
	Total	26	100	18	100

Dari penelitian yang dilakukan di Mojosoongo Berseri I dan Mojosoongo Berseri II masyarakatnya 100% yang tinggal diperumahan ini adalah penduduk asli. Hal ini bisa dilihat dari kepemilikan KTP yaitu KTP Surakarta.

5. Tingkat Pendapatan

Tabel: Tingkat Pendaptan Responden

No.	Keterangan	Mojosongo Berseri I		Mojosongo Berseri II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kurang dari Rp. 100.000	-	-	2	11
2.	Rp. 100.000 – Rp. 250.000	-	-	3	17
3.	Rp. 250.000 – Rp. 300.000	-	-	3	17
4.	Rp. 300.000 – Rp. 450.000	5	19	6	33
5.	Lebih dari Rp. 450.000	21	81	4	22
	Total	26	100	18	100

Tingkat pendapatan baik untuk masyarakat Mojosoongo Berseri I maupun masyarakat Mojosoongo Berseri II bervariasi. Untuk masyarakat Mojosoongo Berseri I pendapatan perbulan Rp 300.000- Rp 450.000 sebanyak 19%, dan untuk pendapatan perbulan lebih dari Rp 450.000 sebanyak 81%. Sedangkan untuk masyarakat Mojosoongo Berseri II pendapatan perbulan kurang dari Rp 100.000 sebanyak 11%, Rp 100.000-Rp 250.000 sebesar 17%, Rp 250.000-Rp300.000 sebanyak 17%, Rp 300.000-Rp 450.000 sebesar 33% dan untuk penghasilan lebih

dari Rp 450.000 sebesar 22%. Perbedaan pendapatan ini disebabkan karena untuk Mojosongo Berseri I permukiman mereka dekat dengan pasar, sehingga mereka lebih leluasa untuk mencari penghasilan. Sedangkan untuk Mojosongo Berseri II pendapatan mereka menurun karena mereka yang dulu usaha di Bantran Kali Anyar setelah lokasi perumahan mereka dipindahkan justru membuat mereka kehilangan usahanya karena rumah yang mereka tempati jauh dari pasar.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa penataan lingkungan dengan menggunakan program P2BPK ini telah berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Masyarakat telah merasakan sendiri hasil dari pembangunan perumahan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan adanya dukungan dari masyarakat kelompok Mojosongo Berseri I maupun Mojosongo Berseri II, maka program P2BPK ini berhasil terlaksana. Hal ini terwujud dari kesadaran masyarakat untuk menata lingkungan kumuh menjadi permukiman yang tertata, rapi dan bersih serta keinginan untuk memperjelas status kepemilikan dari tanah negara menjadi hak mili,, hal itulah yang mendukung keberhasilan dari program P2BPK ini.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Kesimpulan

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kondisi lingkungan perumahan yang semula kurang layak huni menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Dengan menggunakan konsep Pembangunan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) ini menempatkan pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan permukiman, sehingga dapat meningkatkan peran serta aktif masyarakat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman dengan kualitas kehidupan dan penghidupan serta kemandirian masyarakat yang meningkat. Program ini melibatkan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam setiap tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan dilokasi perencanaan.

1. Polusi dan pencemaran menurun drastis. Adanya proses melegalisasi lahan/kepastian hak milik setelah kawasan ini dibangun, dan yang lebih menggembirakan lagi untuk aspek sosial budaya terjadi perubahan hidup yang sehat dan kebersamaan dalam wadah RT/RW. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok di Mojosongo telah mampu mengubah lingkungan secara

fisik dan program tersebut telah terealisasi dengan baik sesuai yang direncanakan.

2. Keberhasilan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Mojosongo ini merupakan hasil kerjasama antara Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II Surakarta, Konsultan Pemberdaya, Instansi terkait, dan peran serta masyarakat.

B. Implikasi

Kota adalah suatu tempat permukiman yang permanen dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok. Adanya kecenderungan meningkatnya arus penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya nurbanisasi yang akan makin memperbesar beban perkotaan. Urbanisasi yang terjadi tanpa disertai industrialisasi yang memadai, lapangan pekerjaan yang cukup ataupun pengupahan yang pasti, telah menjadikan penduduk perkotaan mempunyai kondisi perumahan yang kualitasnya rendah.

Berdasarkan uraian diatas dan kesimpulan penelitian, dapat disampaikan implikasi sebagai berikut:

Dengan adanya kecenderungan meningkatnya arus penduduk di daerah perkotaan, maka masalah penyediaan perumahan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi wilayah perkotaan dimasa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kota yang berlangsung cepat, oleh karena itu untuk memecahkan masalah perumahan pemerintah mengadakan program P2BPK dengan maksud untuk menata daerah yang kumuh secara fisik menjadi hunian yang layak huni. Dengan penataan permukiman ini masyarakat sudah dapat merasakan hasil yang diperoleh. Dengan berhasilnya penataan permukiman ini diharapkan bisa menjadi contoh dalam melanjutkan dan meningkatkan mutu pelaksanaan P2BPK di wilayah setempat maupun wilayah lainnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dengan segala keterbatasannya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masih diperlukannya keterlibatan masyarakat lebih lanjut dalam rangka penanganan pasca konstruksi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun
2. Untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat baik untuk masyarakat Mojosongo Berseri I maupun Mojosongo Berseri II, diharapkan Pemerintah tetap memberikan pembinaan agar masyarakat dapat lebih mengembangkan usahanya dan dapat lebih kreatif.
3. Agar dapat mengetahui perkembangan masyarakat, Pemerintah harus terus mengontrol kegiatan masyarakat baik kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya
4. Perlu ditingkatkan lagi fungsi kawasan eddan sosial ekonomi kehidupan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Salim, Elim. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES

Gilbert, Alan & Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* Tiara Wacana. Yogyakarta

Judohusodo, Siswono. 1991. *Tumbuhnya Permukiman Liar di Daerah Perkotaan*, dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PAU-IS-UI dan PT Gramedia

Judohusodo, Siswoyo, dkk. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Inkoppol

Lexy Maleong. 1995. *Metode Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya

Hadi Sabar Yunus. 1987. *Geografi Permukiman dan Beberapa Permasalahan Permukiman di Indonesia*. Yogyakarta : Dep P & K. Fakultas Geografi UGM

- Arap Matinguny Adris. 1996. Application of The Ecological Approach to Urban Problems and Solutions. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM
- Agus Joko Pitoyo. 1997. Pemanfaatan Angkatan Kerja di Permukiman Kumuh Studi Kasus di Sidomulyo, Lembah Kali Winongo Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kotamadya Yogyakarta. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM
- DPU Cipta Karya.1996. Draft Interim Report. Kotamadia Surakarta
- IR. Herlianto M.Th. 1986 Urbanisasi dan Pembangunan Kota. Bandung : Penerbit Alumni.
- Diklat Ringkasan Proses Perencanaan Partisipatif dalam Kegiatan Peremajaan Permukiman Kota di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta, Surakarta : Dinas Perumahan Surakarta 1996.
- Nurwanti. 2000. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok (P2BPK) kelompok Mojosongo berseri I dan Mojosongo berseri II Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. KONDISI PERMUKIMAN

1. Apakah di rumah saudara sudah memiliki saluran air atau selokan ?
2. Apakah jaringan listrik yang ada telah memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari ? Jelaskan
3. Penyediaan air bersih di lingkungan saudara apakah sudah cukup ?
4. Apakah air yang tersedia sudah memenuhi syarat kesehatan ?
5. Sudah adakah MCK di rumah saudara ?
6. Berapa jarak antara rumah saudara dengan MCK ?
7. Apakah rumah saudara sudah memiliki ventilasi yang cukup ?
8. Sarana kesehatan apa saja yang terdapat di lingkungan saudara ?
9. Terbuat dari apakah atap dan dinding rumah yang saudara huni saat ini ?
Jelaskan !
10. Bagaimana kondisi rumah di lingkungan saudara ?
11. Apakah penempatan lokasi untuk aktivitas ekonomi, sosial, budaya sudah teratur dengan baik ?
12. Bagaimanakah status kependudukan saudara di sini , penduduk asli atau pendatang ?
13. Apakah penghasilan saudara sudah memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari?

B. IMPLEMENTASI PROGRAM P2BPK

1. Kapan program ini di laksanakan ?
2. Siapa yang pertama kali mengusulkan adanya program ini ?
3. Bagaimana proses awalnya sampai terbentuk kelompok swadaya masyarakat dengan nama kelompok Mojosoongo Berseri I / kelompok Mojosoongo Berseri II?
4. Sebelum program P2BPK ini di laksanakan apa ada sosialisasi dari aparat yang berwenang ?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi program P2BPK ini kepada masyarakat ?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat dan aparat setempat setelah mendapatkan penjelasan mengenai program P2BPK ?
7. Langkah apa yang di tempuh selanjutnya ?
8. Apakah dalam tahap perencanaan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan usul, pendapat atau saran ?
9. Apakah pernah di adakan rembug desa ? Berapa kali di adakan ?
10. Kesepakatan-kesepakatan apa yang di capai dalam rembug desa tersebut ?
11. Hambatan-hambatan apa yang di hadapi selama pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut ?





